

ABSTRAK

Nama : Tedy Syahputra
Program Studi: Ekonomi Pembangunan
Judul : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan
Pendapatan di Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan no 8 terendah secara nasional. Ketimpangan Pendapatan yang tinggi merupakan masalah yang dihindari oleh banyak negara karena dapat menyebabkan banyak masalah perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memiliki peluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Ketimpangan pendapatan akan diukur menggunakan rasio gini. Data yang digunakan adalah data *cross section* dari 32 kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2023. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Alat analisis yang digunakan yaitu analisis logistik ordinal dengan menggunakan SPSS 25. Dari hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki peluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 1,427 kali. Variabel UMK memiliki peluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 0,999 kali. Penelitian ini memberikan saran pada pemerintah Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan dan lebih meratakan pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat miskin, dan peninjauan kembali mengenai penetapan upah minimum yang sesuai antara pemberi kerja dan pekerja. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain diluar penelitian ini seperti PDB, jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan dan lainnya. Serta mencoba metode analisis lainnya seperti ARDL, VECM, DEA dan lain sebagainya dalam menganalisis ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten

ABSTRACT

Name : Tedy Syahputra
Study Program: Economic Development
Title : An Analysis of the Factors Affecting Income Inequality in North Sumatra

North Sumatra ranks as the eighth-lowest region in Indonesia in terms of income inequality. High levels of income inequality are a significant concern for many nations, as they can lead to various economic challenges. This study aims to identify the factors that potentially influence income inequality in North Sumatra. Income inequality is assessed using the Gini coefficient. The study utilizes cross-sectional data from 32 regencies and cities in North Sumatra for the year 2023. The variables analyzed in this research include the Human Development Index (HDI), poverty rate, and Regency Minimum Wage (UMK). The analytical method employed in this study is ordinal logistic regression, performed using SPSS version 25. The findings reveal that the HDI variable has an odds ratio of 1,427 times, indicating a significant potential to influence income inequality. Meanwhile, the UMK variable has an odds ratio of 0.999 times. Based on these findings, it is recommended that the government of North Sumatra intensify and equalize infrastructure development, optimize poverty alleviation programs, and reassess the establishment of minimum wages to ensure fairness between employers and employees. Future research is expected to include additional variables beyond those in this study, such as GDP, population size, welfare levels, and others. It is also recommended to try other analytical methods, such as ARDL, VECM, DEA, and others, in analyzing income inequality in North Sumatra.

Keywords: *Income Inequality, Gini Ratio, Human Development Index, Poverty Rate, and Regency Minimum Wage*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang mencolok di masyarakat (Rambey, 2018). Ketimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah keadaan yang tidak semestinya seperti tidak adil. Jadi dapat diartikan bahwasanya ketimpangan pendapatan adalah tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah yang tidak sesuai ataupun tidak merata.

Pendapatan yang tinggi dan merata di masyarakat luas merupakan sebuah tanda dari baiknya perekonomian suatu negara ataupun wilayah. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dihindari oleh semua negara, disebabkan dapat menimbulkan dampak negatif. Menurut Smith & Todaro dalam Wahyuni dan Andriyani (2022) mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menimbulkan inefisiensi ekonomi, melemahnya solidaritas dan stabilitas sosial serta menyebabkan alokasi aset tidak tetap. Dampak negatif ini akan mengganggu perekonomian suatu negara ataupun daerah sehingga menghambat kesejahteraan masyarakat.

Hanya sedikit sekali negara-negara di dunia yang memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang merata contohnya Slovakia, Slovenia, Bellarus dll (*World Bank*, 2024). Ketimpangan ini merupakan masalah besar yang umumnya sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Masalah ketimpangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh

negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk (Damanik et al, 2018).

Isu ketimpangan pendapatan ini merupakan isu yang hangat bahkan hingga muncul istilah “9 naga”. Istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada sekelompok konglomerat yang sangat kaya dan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik negara. Mereka dianggap sebagai simbol dari ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Istilah ini berasal dari mitos Tionghoa yang menggambarkan naga sebagai makhluk yang sangat kuat dan berkuasa (Rivan 2024). Mereka secara tidak langsung merepresentasikan bahwa kekayaan hanya dimiliki segelintir orang diantara penduduk Indonesia.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan atau ketidakmerataan dapat dilihat dari nilai indeks rasio gini yang memiliki rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi, sebaliknya semakin mendekati 0 maka tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat merata (Nurfadila dan Intan 2023). Semakin besarnya nilai indeks gini maka tingkat ketidakmerataan yang terjadi juga semakin tinggi dan jika semakin kecil nilai indeks gini maka ketidakmerataan yang terjadi juga semakin rendah (Sugiarti dan Erdkhadifa, 2023).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia banyak terjadi di daerah dengan tingkat pembangunan dan banyak pusat ekonomi nasional. Tiga provinsi dengan gini ratio tertinggi ada di pulau jawa yaitu: Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Barat

(BPS 2024). Padahal Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir. Sesuai yang diungkapkan hajji pada (Riadi 2020) bahwa tingkat pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Provinsi dengan tingkat ketimpangan yang rendah, mulai dari Bangka Belitung yang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah, diikuti oleh Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Maluku, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kelima provinsi ini memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia (BPS 2024). Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati peringkat 8 secara nasional dan no 4 di pulau Sumatera sebagai provinsi dengan ketimpangan yang rendah.

Sumatera Utara juga memiliki kota Medan yang menempati kota terbesar ke 4 se Indonesia berdasarkan jumlah penduduk (Camelia 2023). Hal ini menarik dikarenakan satu satunya yang masuk 10 kota terbesar di Indonesia dipulau Sumatera. Sumatera Utara juga merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (BPS Sumatera Utara, 2024). Dengan jumlah penduduk yang tinggi, hal ini bisa memungkinkan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Gini Rasio Sumatera Utara menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Sumatera Utara masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik, sebagaimana yang telah dicapai oleh provinsi-provinsi dengan rasio gini yang lebih rendah. Upaya untuk mengurangi kesenjangan di Sumatera Utara dapat

mencakup berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan meningkatkan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1. 1 Perbandingan Data Rasio Gini Indonesia dan Sumatera Utara

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dari data terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan rasio gini. Pada tahun 2020 sebesar 0,381 poin dan terus mengalami peningkatan hingga akhirnya pada tahun 2023 sebesar 0,388 poin artinya selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan di Indonesia, yaitu bencana *covid 19*. Bencana ini mengakibatkan perekonomian mengalami stagnasi, bahkan beberapa negara mengalami resesi besar-besaran. Di Indonesia banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembatasan sosial, dan banyak sektor ekonomi yang mengalami kemunduran (Afriyadi, 2020)

Dari data juga dapat dilihat terjadi sebuah anomali pada Provinsi Sumatera Utara, selama 4 tahun terakhir terjadi penurunan angka rasio gini. Pada tahun 2020 memiliki nilai 0,316 poin, lebih rendah dari nasional yaitu 3,81 poin, tahun 2021

sebesar 0,314 poin, dan tahun 2022 sebesar 0,312 poin, tahun 2023 sebesar 0,309 poin, hal ini menunjukkan provinsi memiliki tingkat pemerataan yang tinggi.

Angka rasio gini di Sumatera Utara memiliki angka yang berbeda dari satu kabupaten dan kabupaten lainnya. Padahal kondisi geografis dan masyarakat yang mendiami wilayah ini memiliki banyak sekali kesamaan ditinjau dari sisi suku dan bahasa. Wilayah ini didominasi oleh suku melayu dan juga batak, yang masih memiliki kemiripan adat dan istiadat sebagai suku yang mendiami wilayah yang sama.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, menjadikannya salah satu wilayah strategis di Indonesia. Salah satu sektor yang menonjol adalah pertambangan minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Langkat, yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Selain itu, Sumatera Utara juga dikenal dengan perkebunan kelapa sawitnya, yang menempati posisi keempat terluas di Indonesia (Adi, 2022). Perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap ekspor dan pendapatan daerah.

Selain sektor pertambangan dan perkebunan, mayoritas penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian provinsi. Letak geografis Sumatera Utara yang strategis, bersebelahan dengan Selat Malaka sebuah jalur perdagangan internasional yang penting juga memberikan keuntungan tambahan. Akses mudah untuk keluar dan masuknya barang melalui jalur ini berperan besar dalam mendongkrak

perekonomian daerah, menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu pusat ekonomi yang vital di wilayah barat Indonesia.

No	KAB/KOTA	INDEKS GINI	No	KAB/KOTA	INDEKS GINI
1	Nias	0,279	18	Serdang Bedagai	0,225
2	Mandailing Natal	0,249	19	Batu Bara	0,225
3	Tapanuli Selatan	0,219	20	Padang Lawas Utara	0,241
4	Tapanuli Tengah	0,241	21	Padang Lawas	0,225
5	Tapanuli Utara	0,262	22	Labuhanbatu Selatan	0,231
6	Toba	0,295	23	Labuhanbatu Utara	0,238
7	Labuhan Batu	0,244	24	Nias Utara	0,228
8	Asahan	0,26	25	Nias Barat	0,208
9	Simalungun	0,295	26	Sibolga	0,246
10	Dairi	0,241	27	Tanjung Balai	0,238
11	Karo	0,24	28	Pematangsiantar	0,329
12	Deli Serdang	0,295	29	Tebing Tinggi	0,317
13	Langkat	0,257	30	Medan	0,373
14	Nias Selatan	0,261	31	Binjai	0,318
15	Humbang Hasundutan	0,256	32	Padang Sidempuan	0,267
16	Pakpak Bharat	0,251	33	Gunung Sitoli	0,308
17	Samosir	0,251			

Gambar 1. 2 Data Bar Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya terjadi keberagaman antar daerah mengenai nilai rasio gini. Daerah yang memiliki rasio gini paling rendah yaitu Nias Barat yang memiliki nilai 0,208 poin, diikuti oleh Batubara, Padang Lawas, dan Serdang Bedagai yang memiliki nilai yang sama sebesar 0,225 poin. Angka ini sangatlah rendah apabila dibandingkan dengan nasional yang memiliki nilai 0,38 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh wilayah yang jauh dari pusat pembangunan dan juga perekonomian sehingga pendapatan terdistribusi secara merata.

Daerah yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi yaitu Medan dengan nilai 0,373 poin, nilai ini mendekati rasio gini nasional tetapi sangat jauh

sekali dibandingkan dengan rasio gini paling rendah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Ketimpangan pendapatan di Medan dapat terjadi walaupun kota dengan pusat perekonomian dan pembangunan di Sumatera Utara, dikarenakan pembangunan dan perekonomian tidak dinikmati secara merata, hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakannya, hal ini memicu ketimpangan pendapatan semakin besar.

Banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi rasio gini, mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi geografis, yang memengaruhi akses dan distribusi sumber daya; inflasi, yang berdampak pada daya beli; serta tingkat pengangguran, yang cenderung memperburuk ketimpangan. Selain itu, kebijakan fiskal dan nilai tukar juga memainkan peran penting dalam distribusi pendapatan (Damanik et al. 2018). Meskipun wilayah-wilayah tersebut mungkin berdekatan secara geografis, hal ini tidak menjamin tidak adanya ketimpangan pendapatan, karena perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antarwilayah dapat menyebabkan disparitas pendapatan yang signifikan.

Ketimpangan pendapatan salah satunya dapat terjadi karena adanya faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) faktor tersebut menunjukkan pengukuran pada keberhasilan pembangunan manusia yaitu pada harapan hidup, pengetahuan, serta kehidupan yang baik (Sugiarti dan Erdkhadifa, 2023). IPM dianggap memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan, karena jika IPM tinggi maka sebagian besar masyarakat akan berpenghasilan lebih tinggi dan tentunya akan mengurangi angka ketimpangan di wilayah tersebut.

No	Kabupaten Kota	IPM	No	Kabupaten Kota	IPM
1	Nias	64,56	18	Serdang Bedagai	71,75
2	Mandailing Natal	68,56	19	Batu Bara	70,31
3	Tapanuli Selatan	68,56	20	Padang Lawas Utara	71,63
4	Tapanuli Tengah	68,56	21	Padang Lawas	70,34
5	Tapanuli Utara	68,56	22	Labuhanbatu Selatan	72,82
6	Toba	68,56	23	Labuhanbatu Utara	73,63
7	Labuhan Batu	68,56	24	Nias Utara	64,64
8	Asahan	68,56	25	Nias Barat	63,7
9	Simalungun	68,56	26	Sibolga	75,2
10	Dairi	68,56	27	Tanjung Balai	70,59
11	Karo	68,56	28	Pematangsiantar	80,46
12	Deli Serdang	68,56	29	Tebing Tinggi	76,98
13	Langkat	68,56	30	Medan	82,19
14	Nias Selatan	68,56	31	Binjai	77,6
15	Humbang Hasundutan	68,56	32	Padang Sidempuan	76,44
16	Pakpak Bharat	68,56	33	Gunung Sitoli	70,68
17	Samosir	72,08			

Gambar 1. 3 Data Bar IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari data dapat dilihat bahwasanya terjadi perbedaan skor IPM walaupun masih berada di wilayah Provinsi yang sama. Urutan kabupaten kota yang memiliki skor IPM paling tinggi yaitu: Medan memiliki IPM tertinggi dengan skor 82,19; Pematang Siantar dengan skor 80,46; berbanding terbalik dengan dua kabupaten kota yang memiliki IPM terendah yaitu Nias Selatan dengan skor 64,12; selanjutnya Nias Barat dengan skor 63,70. Semua ini menunjukkan bahwasanya telah terjadi perbedaan skor IPM di satu provinsi yang sama. Yang menunjukkan terjadi perbedaan kualitas sumber daya manusia di satu provinsi yang sama.

Pada penelitian Nurfadila dan Intan (2023) yang berjudul “Identifikasi Faktor-faktor Pengaruh Indeks Rasio Gini Menggunakan Regresi Logistik Ordinal”. Penelitian ini menggunakan data *cross section* 34 provinsi di Indonesia

tahun 2022 dan regresi logistik ordinal sebagai model analisis data. Penelitian ini menemukan bahwa IPM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap rasio gini.

Selain IPM, tingkat kemiskinan juga dapat dianggap mempengaruhi indeks gini dari suatu wilayah. Ketika masyarakat miskin semakin banyak, maka masyarakat kaya akan semakin sedikit jika dibandingkan dengan masyarakat miskin tersebut. Pada saat kemiskinan semakin tinggi akan menimbulkan dampak negatif yang banyak salah satunya yaitu ketimpangan pendapatan (Nurfadila dan Intan, 2023).

No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)	No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)
1	Nias	15,1	18	Serdang Bedagai	7,44
2	Mandailing Natal	8,86	19	Batu Bara	11,38
3	Tapanuli Selatan	7,01	20	Padang Lawas Utara	8,79
4	Tapanuli Tengah	11,5	21	Padang Lawas	7,89
5	Tapanuli Utara	8,54	22	Labuhan Batu Selatan	8,06
6	Toba	8,04	23	Labuhan Batu Utara	9,08
7	Labuhan Batu	7,99	24	Nias Utara	21,79
8	Asahan	8,21	25	Nias Barat	22,81
9	Simalungun	7,87	26	Sibolga	11,42
10	Dairi	7,47	27	Tanjung Balai	12,21
11	Karo	7,98	28	Pematang Siantar	7,24
12	Deli Serdang	3,44	29	Tebing Tinggi	9,49
13	Langkat	9,23	30	Medan	8
14	Nias Selatan	16,39	31	Binjai	4,79
15	Humbang Hasundutan	8,69	32	Padang Sidempuan	6,85
16	PakPak Bharat	7,54	33	Gunung Sitoli	14,78
17	Samosir	11,66			

Gambar 1. 4 Data Bar Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari tabel diatas bahwasanya wilayah Kabupaten Nias Barat dan Utara masih menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin paling banyak dan berbanding terbalik dengan daerah dekat ibukota Provinsi yaitu Binjai dan Deli Serdang. Dengan presentase berikut Nias Barat 22,81%; Nias Utara 21,79%; selanjutnya kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit yaitu

kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang yang masing-masing sebesar 4,79% dan 3,44%. Data menunjukkan bahwasanya ada perbedaan yang sangat jelas terjadi di satu provinsi yaitu Sumatera Utara.

Pada penelitian Wulan Nuryulianingdyah (2022) yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia” penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, *Spatial Autoregressive (SAR) Model*, dan *Spatial Error Model (SEM)*. Menggunakan data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap rasio gini dengan menggunakan metode SEM.

Selain tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum juga menjadi indikator penting dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tinggi atau rendah mencerminkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja di suatu wilayah. Ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam UMK di berbagai kabupaten dalam satu provinsi, hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang mencolok. Jika UMK di satu kabupaten jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di provinsi yang sama, maka para pekerja di wilayah tersebut mungkin tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan kesejahteraan yang sama, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pendapatan antarwilayah dalam satu provinsi.

NO	/Kota	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	NO	/Kota	Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1	Medan	Rp3.624.118	18	Toba	Rp2.882.740
2	Batu Bara	Rp3.410.034	19	Mandailing Natal	Rp2.874.313
3	Deli Serdang	Rp3.400.015	20	Binjai	Rp2.803.941
4	Karo	Rp3.274.725	21	Simalungun	Rp2.800.790
5	Sibolga	Rp3.197.760	22	Gunungsitoli	Rp2.776.496
6	Labuhanbatu Selatan	Rp3.152.342	23	Tapanuli Utara	Rp2.739.641
7	Labuhanbatu	Rp3.116.458	24	Tebingtinggi	Rp2.731.150
8	Tapanuli Selatan	Rp3.090.695	25	Nias	Rp2.723.199
9	Labuhanbatu Utara	Rp3.081.813	26	Pakpak Bharat	Rp2.716.161
10	Serdang Bedagai	Rp3.070.171	27	Dairi	Rp2.710.493
11	Asahan	Rp3.024.301	28	Nias Selatan	Rp2.710.493
12	Tanjungbalai	Rp3.022.759	29	Humbang Hasundutan	Rp2.710.493
13	Tapanuli Tengah	Rp3.019.195	30	Samosir	Rp2.710.493
14	Padang Lawas	Rp2.959.919	31	Nias Utara	Rp2.710.493
15	Padang Lawas	Rp2.959.919	32	Nias Barat	Rp2.710.493
16	Langkat	Rp2.902.505	33	Pematangsiantar	Rp2.710.493
17	Padang Sidempuan	Rp2.885.309			

Gambar 1. 5 Data Bar UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: KataData, 2023

Dari tabel terlihat wilayah Kabupaten Nias menunjukkan tingkat UMK yang rendah dibandingkan kabupaten yang sama provinsi yang tidak jauh dengan Medan sebagai wilayah pusat perkotaan di Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya Kota Medan memiliki UMK Rp3.624.118; dan Kabupaten Batu Bara UMK Rp3.410.034;. Di sisi lain UMK terendah dipegang oleh Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat yaitu masing-masing Rp2.710.493.

Pada penelitian Istikharoh, Prijanto, dan Destiningsih (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2018” menggunakan data panel serta analisis regresi data panel dari tahun 2008-2018 pada kabupaten dan kota di Yogyakarta. Hasil penelitian ini

menemukan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Yogyakarta.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ketimpangan pendapatan dapat direpresentasikan oleh rasio gini, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah IPM, tingkat kemiskinan, dan UMK berdasarkan penelitian terdahulu. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara”**. Penelitian ini menggunakan *data cross section* 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan variabel dependen (Y) Ketimpangan Pendapatan dan variabel independen (X) yaitu IPM, Tingkat Kemiskinan, dan UMK.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peluang IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?
2. Bagaimana peluang Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?
3. Bagaimana peluang UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar peluang IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
2. Mengetahui seberapa besar peluang Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
3. Mengetahui seberapa besar peluang UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memahami hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Ketimpangan Pendapatan. Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini menawarkan wawasan mendalam yang dapat memperkaya teori ekonomi terkait distribusi pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan model ekonomi yang lebih kontekstual, serta menjadi referensi penting dalam diskusi akademis mengenai pemerataan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah dan memberikan kontribusi teori yang berharga bagi peneliti dan pembaca dalam memahami

ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dan masukan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, membantu mengembangkan pendekatan baru dalam eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran teoritis, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pemerataan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas jika dipublikasikan dan disebarluaskan kepada khalayak umum. Penyebarluasan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ketimpangan pendapatan dan mendorong diskusi yang lebih luas tentang bagaimana mengatasi masalah ini secara efektif. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami dinamika ekonomi di wilayahnya dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia akademis, tetapi juga bagi masyarakat luas, dengan harapan dapat memicu perubahan positif dalam upaya mencapai pemerataan ekonomi di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berikut adalah landasan teori yang berisi penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketidakseimbangan pendapatan merupakan masalah yang menimpa semua negara baik negara berkembang dan juga negara maju (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Semakin tinggi tingkat suatu ketimpangan berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata. Ketika distribusi yang tidak merata ini terjadi maka akan terjadi sebuah jarak antara kelas bawah, menengah dan atas (kaya).

Ada banyak sekali masalah yang dapat ditimbulkan dari apa yang disebut oleh ketimpangan. Seperti peningkatan kriminal dan lain sebagainya. Ketimpangan berdampak pada berbagai masalah sosial dan kesehatan, yaitu meningkatnya kekerasan dan kriminalitas, depresi dan gangguan mental, tingkat ketergantungan pada alkohol dan narkoba, kehamilan remaja, peningkatan angka putus sekolah serta memburuknya modal sosial (kemampuan antar orang dalam masyarakat untuk saling bekerjasama demi kemaslahatan bersama) (Wulan, 2022).

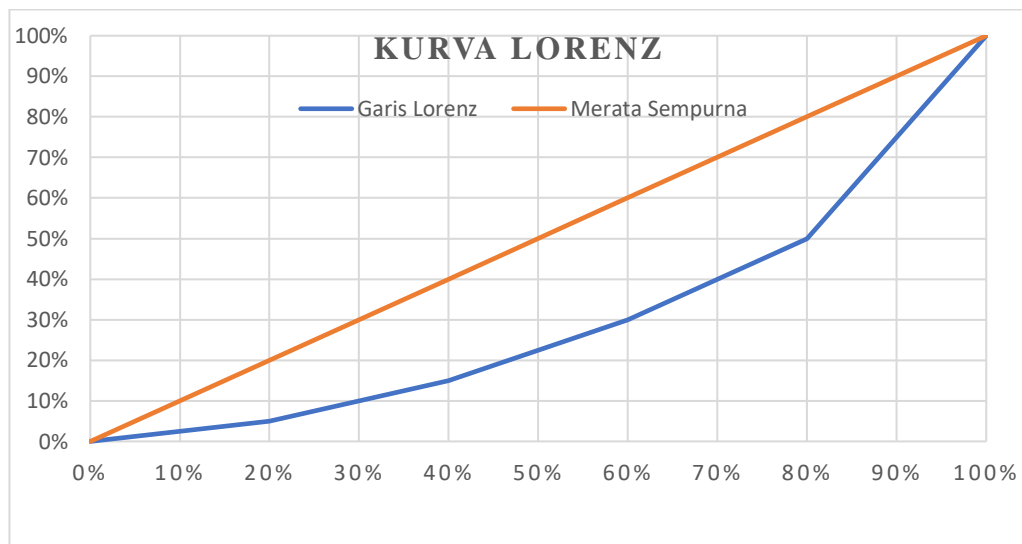
2.1.1.1 Indikator Ketimpangan Pendapatan

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama seorang ahli statistika dari Amerika Serikat bernama Conrad Lorenz yang memperkenalkan kurva tersebut pertama kali pada

tahun 1905, di mana dia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dengan pangsa pendapatan mereka (Subandi, 2014).

Kurva ini tergambar dalam sebuah bujursangkar sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan.



Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Sumber: Subandi, (2014)

Penentuan tingkat ketimpangan Kurva Lorenz dilihat dari jauh dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal. Semakin dekat garis lengkung dengan garis lurus diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh garis lengkung terhadap diagonal, maka ketimpangan yang terjadi semakin buruk. Cara untuk menggambar kurva Lorenz dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut (Cepy, 2022):

- 1) Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
- 2) Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data.

- 3) Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 4) Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 5) Menghitung persentase kumulatif pendapatan masing-masing desil.
- 6) Memetakan dalam plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil sebagai sisi horizontal dan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

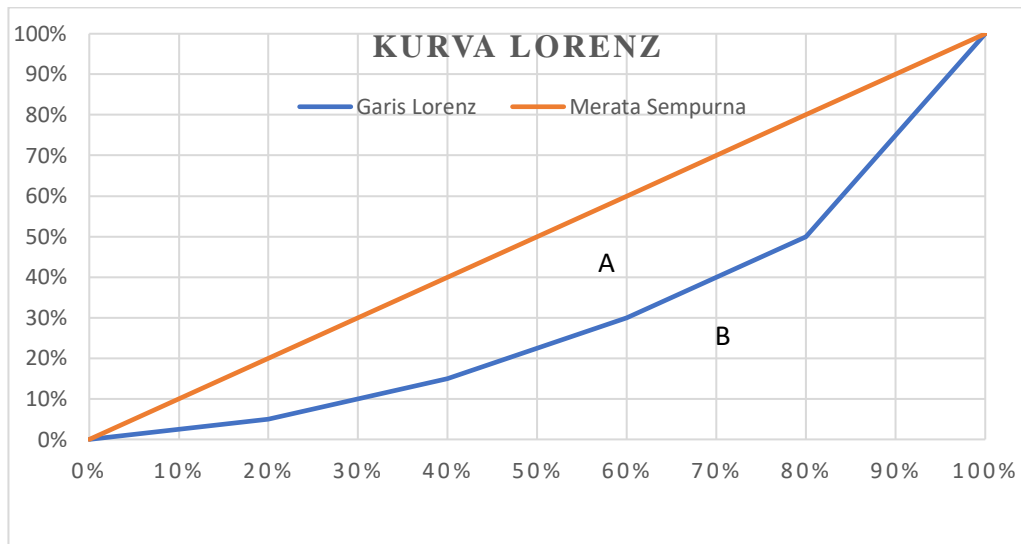
Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan dari rasio gini.

b. Gini Ratio

Gini ratio (atau dikenal juga dengan *Gini Coefficient*) pertama kali dikembangkan oleh ahli statistik berkebangsaan Italia bernama Corrado Gini pada 1912. Gini mengembangkan koefisiennya berdasarkan Kurva Lorenz yang dikembangkan Max Otto Lorenz pada 1905. Ukuran ketidakmerataan yang direpresentasikan oleh Rasio Gini berada dalam kisaran antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan yang sempurna).

2.1.1.2 Formula Perhitungan Ketimpangan Pendapatan dengan Gini Ratio

Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan Kurva Lorenz, dibagi dengan luas bidang di atas dan di bawah Kurva Lorenz itu berada. Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 2. 2 Kurva Lorenz dan Perhitungan Gini Ratio

Sumber gambar: JagoEkonomi.com

Mneurut Cepy (2022) untuk menghitung rasio gini menggunakan rumus:

$$\text{Gini} = \frac{A}{A+B}$$

Keterangan:

A = luas daerah antara kurva Lorenz dan garis referensi kesetaraan

B = luas total di bawah garis referensi kesetaraan.

Jika Gini = 0 ketimpangan pendapatan merata sempurna

Jika Gini = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna

Ukuran ketimpangan di penelitian akan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang didasarkan pada nilai rasio gini dari setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya (kategori). Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif, sebaliknya data yang disusun menurut kualitasnya (kategori) disebut distribusi frekuensi kualitatif (Wahab et al, 2021)

2.1.1.3 Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Menurut Adelman dan Morris dalam Nurul (2017) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang barang
3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Menyebabkan pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

Menurut Sjafrizal (2014) ada lima faktor penyebab dari ketimpangan antarwilayah, yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
2. Perbedaan kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
5. Alokasi dana pembangunan antarwilayah

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah indikator yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme* atau *UNDP*) pada tahun 1990. Indeks ini diciptakan sebagai alternatif dari ukuran pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesejahteraan manusia.

Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990, berfungsi sebagai pengantar awal gagasan pembangunan manusia. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India pada tahun 1998 yaitu Amartya Sen dan Mahbub ul Haq, seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*.

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) merupakan sebuah ukuran pencapaian pembangunan manusia yang didasarkan pada beberapa elemen dasar dari kualitas hidup. IPM dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan tiga dimensi utama: kesehatan, wawasan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi ini mencerminkan aspek-aspek fundamental dari kehidupan manusia yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Setiap dimensi dalam IPM memiliki definisi yang luas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam. Untuk mengukur kesehatan, indikator yang sering digunakan adalah harapan hidup, yang mencerminkan kondisi kesehatan dan umur panjang masyarakat. Sementara itu, dimensi wawasan diukur melalui indikator lama sekolah, yang menunjukkan tingkat pendidikan dan akses terhadap pengetahuan. Dimensi kehidupan yang layak biasanya diukur melalui daya beli, yang mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam konteks ekonomi (Anam et al, 2021). Dengan demikian, IPM memberikan pandangan yang lebih holistik tentang pembangunan manusia daripada sekadar ukuran ekonomi konvensional.

Menurut Tenen (2019) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, Pendidikan hidup dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang

atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

2.1.2.2 Unsur yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak (BPS, 2024).

1. Harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat. Harapan hidup saat lahir adalah indikator yang baik tentang seberapa sehat suatu bangsa.
2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang digabungkan untuk menciptakan dimensi pengetahuan dari indeks pembangunan manusia. Harapan lama sekolah adalah jumlah tahun yang diperkirakan akan dihabiskan oleh seseorang yang berusia 7 tahun dalam pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah yang dicakup adalah rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal.
3. Jumlah pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan untuk menghitung komponen standar hidup yang layak. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian indikator ini memiliki tren meningkat sebelum pandemi COVID-19 menyebar. Untuk kali pertama sejak metode baru penghitungan IPM diadopsi di Indonesia, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020 turun menjadi Rp11.013.000 per tahun. Pada tahun 2021, capaian indikator ini mulai mengalami pemulihan, dimana capaiannya meningkat menjadi Rp11.156.000 per tahun.

2.1.2.3 Formula Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut (BPS, 2024)

1. Unsur Kesehatan

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Maks} - AHH_{Min}}$$

Keterangan:

I Kesehatan = Indeks angka harapan hidup

AHH = Angka harapan hidup

AHHmin = Angka harapan hidup terendah

AHHmaks = Angka harapan hidup tertinggi

2. Unsur Pendidikan

$$I \text{ Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

Ipendidikan = Indeks Pendidikan

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

3. Unsur Pendapatan

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{l_{\text{kesehatan}} \times l_{\text{pendidikan}} \times l_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pokok. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang dianggap sebagai tuntutan minimal dan memiliki standar tertentu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut teori Nurkse dalam (Jhingan, 2016), kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*), adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah, dan pendapatan yang rendah akan menyebabkan berkurangnya tabungan dan investasi. Jika upah terus turun, kemiskinan akan terjadi karena tidak akan ada cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu memperoleh standar hidup yang layak. Persentase penduduk miskin yang besar merupakan pertanda bahwa tingkat kemiskinan di suatu daerah juga tinggi, sehingga penting untuk menghentikan penambahan penduduk miskin.

2.1.3.1 Jenis Kemiskinan

Subandi (2014) membagi kemiskinan secara sederhana dan umum menjadi beberapa ukuran:

1. Kemiskinan Absolut

Jika pendapatan seseorang atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasarnya, mereka dianggap hidup dalam kemiskinan absolut. Metrik ini digunakan untuk menentukan pendapatan minimal yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan untuk mempertahankan standar hidup seseorang.

2. Kemiskinan Relatif

Jika kebutuhan mendasar seseorang atau kelompok telah terpenuhi, tetapi mereka jauh lebih buruk keadaannya daripada lingkungan terdekatnya, orang atau kelompok tersebut dianggap berada dalam kemiskinan relatif. Menurut metrik ini, garis kemiskinan akan menyesuaikan diri untuk mencerminkan perubahan taraf hidup masyarakat, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau permanen.

2.1.3.2 Persentase Penduduk Miskin

Menurut BPS (2024), persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Garis kemiskinan di Indonesia bisa disebut juga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) merupakan nilai pengeluarann kebutuhan minimum makanan dari 52 jenis komoditi dasar (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) yang dikonsumsi oleh penduduk yang kemudian disamaratakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Jadi persentase penduduk miskin adalah total penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang kemudian dibandingkan dengan total jumlah penduduk.

2.1.3.3 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro dalam (Subandi 2014) di pandang dari sisi ekonomi. Ada 3 hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu:

1. Sumber daya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan akar penyebab kemiskinan. Orang miskin berkualitas buruk dan memiliki sedikit sumber daya.
2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab kemiskinan. Rendahnya pendidikan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan rendahnya gaji.
3. Disparitas akses terhadap modal menjadi penyebab kemiskinan. Alasan pendapatan mereka yang buruk adalah keterbelakangan, kekurangan pasar, dan

kekurangan modal. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tingkat investasi dan tabungan.

2.1.4 Upah Minimum Kabupaten

Upah digambarkan sebagai tanda terima yang diberikan sebagai imbalan atas penyediaan tenaga seseorang kepada penerima tenaga kerja untuk tugas atau layanan yang telah atau akan dilakukan. Menurut Sukirno (2016) upah adalah pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh karyawan berdasarkan ketentuan kontrak kerja dalam bentuk uang atau barang, dan dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan karyawan dan keluarganya. Menurut teori ekonomi, upah adalah jumlah uang yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas berbagai layanan yang mereka lakukan.

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum Kabupaten

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 13 (2003) tentang ketenagakerjaan memberikan definisi “Upah adalah hak pekerja/tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/tenaga kerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Pada Peraturan Pemerintah RI (2021) dijelaskan kemudian bahwa upah minimum adalah standar paling rendah upah yang dibayarkan pengusaha pada pekerja (buruh). Upah minimum berlaku pada rentang Provinsi (Upah Minimum

Provinsi) yang artinya berlaku di satu provinsi sedangkan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten yang berlaku di satu wilayah kabupaten.

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 36 (2021) tentang pengupahan (yang merupakan turunan UU Cipta Kerja). Faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan.

a. **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi daerah mengacu pada peningkatan nilai ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya diukur dengan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu.

b. **Inflasi**

Inflasi di daerah mengacu pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah tertentu. Biasanya diukur dengan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) daerah tersebut. IHK adalah rata-rata tertimbang dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di suatu daerah dalam periode tertentu.

2.1.4.3 Formula Perhitungan Upah Minimum Kabupaten

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (MENAKER), berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang "Pengupahan", penetapan upah minimum dilaksanakan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Adapun formulanya adalah:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \left\{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left(\frac{\text{Batas atas}_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas}_{(t)} - \text{Batas bawah}_{(t)}} \right) \times UM_{(t)} \right\}$$

Keterangan:

UM(t+1) = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM(t) = Upah minimum tahun berjalan

Max = Fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi

PE(t) = Pertumbuhan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan (dalam persen).

Inflasi(t) = Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen)

Batas atas(t) = Acuan batas tertinggi bagi upah minimum yang akan ditetapkan

Batas bawah(t) = Acuan batas terendah bagi upah minimum yang akan ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian ini peneliti memperdalam dan menemukan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini et al (2022) yang berjudul "Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rasio Gini di Indonesia" penelitian berlokasi di Indonesia dengan menggunakan rentang data 2016-2020. Penelitian ini menggunakan analisis data panel sebagai metodenya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih untuk menggambarkan rasio gini di Indonesia tahun 2016-2020 adalah *fixed time effect model* dengan nilai R_2 sebesar 40,285%

dipengaruhi oleh IPM, jumlah populasi, ketenagakerjaan, presentase penduduk miskin, dan rata-rata gaji per jam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila dan Intan (2023) yang berjudul " Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Rasio gini Menggunakan Regresi Logistik Ordinal" penelitian berlokasi di Indonesia pada tahun 2022 menggunakan data *cross section* 34 provinsi serta analisis regresi Logistik Ordinal sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 variabel independen yang diteliti yaitu: IPM, pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, PDRB, jumlah penduduk, dan persentase penduduk miskin. Hanya 3 variabel saja yang berpengaruh yaitu: IPM, jumlah penduduk, dan persentase penduduk miskin. Hasil penelitian menyimpulkan pengaruh dari variabel independen tersebut direpresentasikan dengan *koefisien determinasi* sebesar 61,7%. Dengan artian seluruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian berpengaruh terhadap indeks rasio gini sebesar 61,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini sebesar 38,3%.

Penelitian yang dilakukan oleh Amri (2017) yang berjudul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Panel Data 8 Provinsi di Indonesia". Penelitian ini berlokasi di pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung selama periode 2007-2015. Data yang digunakan yaitu panel dari 8 provinsi di Sumatera. Data dianalisis menggunakan metode *Panel Vektor AutoRegresi (PVAR)* dan uji kausalitas *Panel Granger*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada tahun

sebelumnya. Demikian pula, ketimpangan pendapatan pada tahun tertentu juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan pada tahun sebelumnya. Uji kausalitas *Panel Granger* menunjukkan adanya hubungan kausalitas searah, yaitu dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi. Hubungan lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan Istiqamah et al (2018) yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-provinsi di Indonesia)" Penelitian ini berlokasi di Indonesia pada tahun 2010-2016 menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia serta, menggunakan analisis regresi data panel sebagai metode penelitian. Hasil penelitian secara parsial menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Rambey (2018) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia" Penelitian ini berlokasi di Indonesia pada Tahun 2011 sampai 2016 serta menggunakan data panel dari seluruh Provinsi di Indonesia sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan persamaan simultan sebagai model analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan adalah sebesar 3,5% , sedangkan sisanya sebesar 96,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam Model ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Angkat dan Saharudin (2024) yang berjudul “Pengaruh Indeks Rasio Gini, Indeks Kemahalan Kontruksi, Pengeluaran Perkapita, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Penelitian ini berlokasi di Sumatera Utara pada tahun 2018-2022 serta menggunakan data panel dari 33 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini secara parsial yaitu variabel rasio gini tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan Sugiarti and Erdkhadifa (2023) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021”. Penelitian ini berlokasi di Jawa Timur pada tahun 2021 serta menggunakan data *cross section* dari 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial memperlihatkan bahwa dari lima variabel yang digunakan setelah dilakukan analisis dengan menggunakan metode *pricipal component analysis* terbentuk menjadi dua faktor yaitu pertama faktor kualitas sumberdaya manusia dengan indikatornya antara lain: indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka serta rata-rata pendidikan. Kualitas sumber daya manusia terdapat pengaruh dengan positif serta adanya signifikan terhadap ketimpangan pedapatan di beberapa kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Sementara faktor jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan Wahyuni and Andriyani (2022) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh”. Penelitian ini berlokasi di provinsi Aceh pada tahun 2005-2019. Data yang digunakan yaitu data deret waktu serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Omar and Inaba (2020) yang berjudul “*Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis*”. Penelitian ini berlokasi di seluruh dunia pada periode tahun 2004-2016 serta menggunakan data panel dari 116 negara berkembang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian secara parsial menemukan bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, rasio pengguna internet, rasio ketergantungan usia, inflasi, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan. Inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan di negara berkembang.

Di penelitian lainnya yang dilakukan oleh Park and Mercado (2021) yang berjudul “*Financial inclusion: New measurement and cross-country impact assessment*”. Penelitian ini dilakukan di dunia pada tahun 2011-2014 menggunakan data panel dari 151 negara sebagai objek penelitian yang selanjutnya dibagi dalam

4 kategori yaitu MIL = *Middle-Income Low Economies*, MIH = *Middle-Income High Economies*, LIC = *Low-Income Economies*, HIC = *High-Income Economies*. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa inklusi keuangan yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, namun hanya untuk negara-negara dengan pendapatan tinggi dan menengah-tinggi, bukan negara-negara dengan pendapatan menengah-bawah dan rendah. Namun, mereka tidak menemukan pengaruh signifikan inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan pada kelompok pendapatan mana pun.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

IPM merupakan sebuah indikator mengenai kualitas sumber daya manusia, awalnya dikembangkan oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq pada tahun 1990, dengan dukungan dari Amartya Sen dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). IPM bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pembangunan manusia daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penelitian Kuznets yaitu tahapan peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan tidak dapat dihindari begitu saja, tetapi itu semua berkaitan dengan sejauh mana pembangunan yang dilakukan oleh setiap Negara (Putra dan Anis 2022). Artinya pendapatan di pengaruhi oleh pembangunan dilakukan oleh negara diberbagai sektor seperti pendidikan,kesehatan dan lain-lainnya.

Tingkat IPM yang berbeda setiap daerah dapat mengakibatkan ketimpangan kemampuan Sumber Daya Manusia antar daerah yang direpresentasikan oleh tingkat IPM. Pada hasil penelitian Rini et al. (2022) IPM berpengaruh signifikan pada rasio gini Indonesia pada tahun 2016-2020 sebesar 40,82% dan tentu dipengaruhi faktor lainnya. Hal menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara IPM dan rasio gini.

2.3.2 Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan kecilnya pendapatan masyarakat pada suatu daerah, menurut teori Nurkse dalam (Jhingan, 2016), kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*). Adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang rendah, dan pendapatan yang rendah akan menyebabkan semakin banyaknya masyarakat miskin.

Masyarakat kaya yang produktif akan lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat miskin yang semakin banyak sebagai contoh dari lingkaran setan kemiskinan, kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Nurfadila and Intan (2023) persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gini sebesar 61,7% dan tentu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil penelitian menegaskan ada hubungan yang jelas antara masyarakat miskin dan rasio gini.

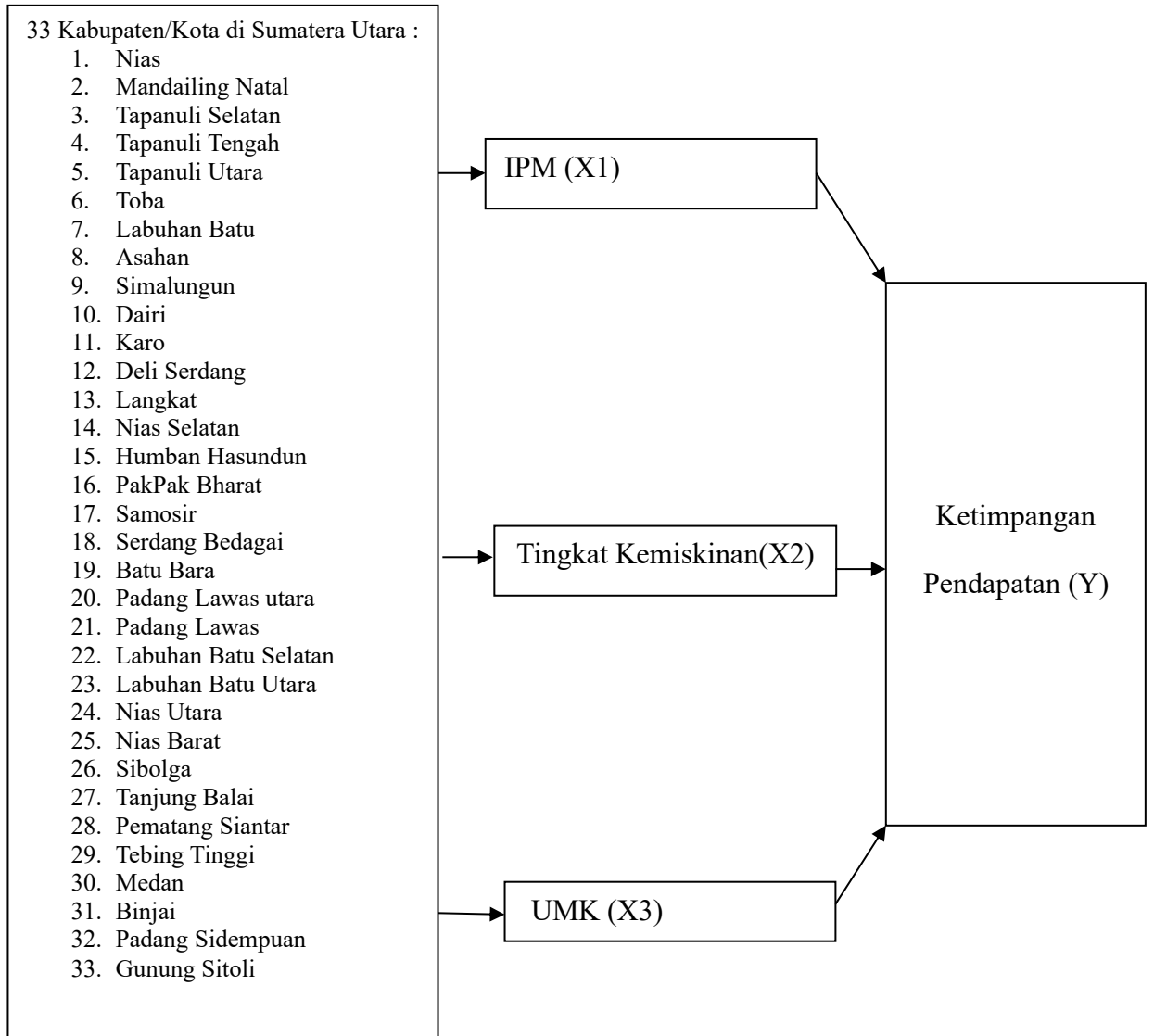
2.3.3 Hubungan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Pendapatan

UMK yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dipengaruhi oleh biaya hidup di suatu wilayah, oleh sebab itu terjadi perbedaan mengenai besaran dari UMK di kabupaten/kota yang berbeda. Selain biaya hidup juga ada teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) yang menyatakan bahwa peningkatan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja (Agusalim dan Novianti 2023).

Semakin rendah ataupun tingginya upah pada suatu wilayah berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di wilayah itu. Jika semakin rendah maka tingkat produktivitas akan berkurang begitu juga sebaliknya. Pada penelitian Istikharoh et al (2018) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Yogyakarta.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan alur dari suatu penelitian. Adapun alur dalam penelitian ini yang terdiri dari tiga variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X1), Tingkat Kemiskinan (X2) dan Upah Minimum Kabupaten (X3) akan diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y) dengan menggunakan model Regresi Logistik Ordinal. Untuk melihat faktor mana yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara pada penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H_1 : Diduga IPM memiliki peluang berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
- H_2 : Diduga Tingkat Kemiskinan memiliki peluang berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
- H_3 : Diduga UMK memiliki peluang berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yaitu Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Persentase Penduduk Miskin. Dalam penelitian ini menggunakan data *cross section* tahun 2023 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Lokasi penelitian berada di Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dan berjenis *cross section*. Data sekunder merupakan data penelitian yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara. *Cross section* dalam penelitian ini adalah data deret lintang 34 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu IPM, persentase penduduk miskin, dan rasio Gini, sedangkan data UMK didapat dari website KataData.com. Data diolah dengan *software* SPSS 25.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan membaca, menyalin serta mengolah data-data atau catatan-catatan yang tertulis di instansi terkait yaitu, dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan KataData.com. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: indeks gini, indeks pembangunan manusia, persentase kemiskinan, dan upah minimum kabupaten.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah ciri/sifat, benda, orang, atau kegiatan yang berbeda secara signifikan satu sama lain dan telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) merupakan dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel output, konsekuen, ataupun variabel terikat. Variabel terikat dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas.

Variabel terikat di penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (direpresentasikan oleh rasio gini) tahun 2023. Ketimpangan Pendapatan adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Dilihat melalui Rasio Gini yang dihitung dan ditetapkan oleh BPS, rasio ini merupakan sebuah indeks 0-1 yang mendekati angka 0 lebih baik. Rasio Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diambil dari situs BPS Sumatera Utara dan memiliki satuan skala dari 0-1.

3.4.2 Variabel Bebas (Independen Variabel)

Variabel bebas juga disebut variabel stimulus atau prediktor. Variabel bebas dapat diartikan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan menyebabkan perubahan. Variabel independen pada penelitian ini yaitu:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah pencapaian pembangunan manusia yang didasarkan pada tiga ukuran dasar, yaitu kesehatan, wawasan, dan kehidupan yang layak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh BPS. Data IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara diambil dari website BPS Sumatera Utara dengan satuan skor 1-100.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah minimum kabupaten/kota adalah standar paling rendah upah yang dibayarkan pengusaha pada pekerja (buruh) di tingkat kabupaten/kota berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah. Data UMK ini diambil dari website KataData.com dan data menggunakan satuan Rupiah.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan di Indonesia bisa disebut juga penduduk miskin. Data ini diambil dari website BPS Sumatera Utara dan menggunakan satuan persen.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Ada beberapa jenis metode regresi logistik yaitu:

a. Regresi Logistik Biner

Regresi logistik biner adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel

dependen biner (yang hanya memiliki dua kategori, seperti "ya/tidak", "sukses/gagal", atau "0/1"). Tujuannya adalah untuk memodelkan probabilitas kejadian dari salah satu dari dua kemungkinan hasil berdasarkan nilai variabel independen.

b. Regresi Logistik Ordinal

Regresi logistik ordinal adalah pemodelan regresi logistik untuk data prediktor-respons dengan respons kategorik ordinal non-biner (kategorik ordinal dengan jumlah kategori dua atau lebih dari dua). Pengolahan data pada regresi logistik ordinal tetap dilakukan dengan menggunakan himpunan nilai prediktor yang sama, memisahkannya ke dalam dua bagian dengan respons modifikasi $MY = 1$ dan $MY = 0$ seperti pada regresi logistik biasa, tetapi dilakukan secara berulang dengan memindah-mindahkan titik *cutoff* untuk respons-nya (Johan, 2018).

c. Regresi Logistik Multinomial

Regresi logistik multinomial (regresi logistik politomi) adalah pemodelan regresi logistik untuk data prediktor-respons dengan respons kategorik nominal non-biner. Misalkan dimiliki data prediktor-respons dengan respons berskala nominal non-biner yang memiliki M kategori, maka akan dipilih 1 kategori sebagai kategori dasar (*baseline*), dan tiap kategori lainnya masing-masing akan dibandingkan dengan kategori dasar ini, sehingga diperoleh $(M - 1)$ model regresi logistik. Jika tidak dispesifikasikan, umumnya yang diambil untuk kategori dasar secara *default* adalah kategori dengan nilai respons terendah.

3.5.1 Regresi Logistik Ordinal

Penelitian ini menggunakan metode regresi Logistik Ordinal. Syarat untuk menggunakan regresi ini yaitu variabel dependen memiliki skala ordinal dua kategori atau lebih (Darnah, 2011). Dalam regresi logistik ordinal yang digunakan yaitu model logit kumulatif. Logit kumulatif bersifat kategorik pada variabel dependen yang didistribusikan ke dalam peluang kumulatif (Nurfadila dan Intan, 2023).

Rumus:

$$p(y \leq \frac{j}{x}) = \frac{\exp(\beta_0 j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}{1 + \exp(\beta_0 j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}$$

Keterangan:

$p(y \leq \frac{j}{x})$ adalah Probabilitas kumulatif bahwa variabel dependen y berada pada kategori j atau lebih rendah, dengan syarat diberikan variabel independen x .

$\beta_0 j$ adalah konstanta atau intersep khusus untuk kategori j . Setiap kategori j dalam variabel dependen memiliki intersep yang berbeda.

$\sum_{k=1}^p \beta_k x_k$ adalah umlah dari perkalian setiap koefisien regresi (β_k) dengan variabel independen (x_k) yang sesuai. Di sini, k berfungsi sebagai indeks yang menunjukkan variabel independen dari 1 hingga p , di mana p adalah jumlah variabel independen.

$j = 1, 2, \dots, j$ merupakan kategori dari variable dependen serta

β adalah vektor koefisien regresi.

Yang selanjutnya akan pembentukan model persamaan logit yaitu:

- Model pertama : $\text{logit}(Y_M) = \beta_{0-I} + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p$
- Model kedua : $\text{logit}(Y_M) = \beta_{0-II} + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p$
- Model ketiga : $\text{logit}(Y_M) = \beta_{0-III} + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p$

Jika hanya memiliki 3 pengelompokan ordinal, maka hanya menggunakan 2 model logit.

3.5.2 Uji Parameter Regresi Logistik Ordinal

Dalam menganalisis parameter pada regresi logistik ordinal dilaksanakan secara keseluruhan dan sebagian (Nurfadila dan Intan 2023).

a. Uji Simultan (Uji-G)

Dalam pengujian parameter secara keseluruhan dapat menggunakan statistik uji-G dengan acuan pada hipotesis.

- a. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$ (Tidak ada pengaruh dari variabel independen secara menyeluruh)
- b. H_1 : paling sedikit ada satu $\beta_k \neq 0$ (Ada pengaruh dari variabel independen secara menyeluruh)

Dengan uji statistik yang digunakan sebagai berikut:

$$G2 = -2 \ln \left(\frac{L_1(\emptyset)}{L_2(\emptyset)} \right)$$

Keterangan:

$L_1(\emptyset)$ merupakan fungsi *likelihood* yang tidak memiliki variabel independen,

$L_2(\emptyset)$ merupakan fungsi *likelihood* yang memiliki variabel independen di dalamnya,

\ln adalah fungsi logaritma natural (basis e).

Penarikan kesimpulan ketika nilai distribusi chi-square \leq nilai uji-G artinya tolak H_0 . Jika nilai p (p -value) $\leq \alpha$ (0,05), maka kita juga dapat menolak H_0 .

b. Uji Parsial (Uji *Wald*)

pengujian secara sebagian dapat menggunakan uji *wald* dengan acuan pada hipotesis berikut:

a. $H_0: \beta_k = 0$ (tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen)

b. $H_1: \beta_k \neq 0$ (terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen)

uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$W^2 = \left(\frac{\beta_k}{SE(\beta_k)} \right)^2$$

Keterangan:

β_k : nilai estimasi dari parameter regresi,

$SE(\beta_k)$: *standart error*.

Untuk penarikan kesimpulan menolak H_0 ketika nilai *wald* $> (1)$ atau ketika nilai p -value $\leq \alpha$ (0,05).

c. *Odds Ratio*

Odds Ratio (OR) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dalam analisis regresi logistik atau ordinal. OR menunjukkan seberapa besar kemungkinan (*odds*) terjadinya suatu peristiwa dipengaruhi oleh variabel independen, serta menggambarkan kecenderungan

bagian populasi dalam satu kategori terhadap kategori lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Budyanra dan Azzahra 2017).

Rumusnya dapat dinyatakan sebagai:

$$\text{Odds Ratio (OR)} = e^{\beta}$$

Keterangan:

e adalah bilangan eksponensial (2,718),

β adalah koefisien regresi dari variabel independen yang dihasilkan dari model regresi.

Menurut Hosmer, Lemeshow, dan Sturdivan dalam Budyanra dan Azzahra (2017) *odds ratio* menggambarkan perubahan (peningkatan atau penurunan) kecenderungan setiap pertambahan satu unit variabel independen, jika variabel independen tersebut kontinyu, atau perbedaan kecenderungan antar kategori, jika variabel independen bersifat kategorik.

3.5.3 Uji Kebaikan Model (*goodness of fit*)

Uji kebaikan model (*goodness of fit*) digunakan untuk mengetahui apakah model regresi logistik ordinal yang diperoleh bisa/layak untuk digunakan Liu & Koirala, 2012; Margono, 2013; Scott, Hosmer, & Lemeshow, 1991 di dalam (Nurfadila dan Intan 2023). Dalam pengujian kebaikan model atau *goodness of fit* menggunakan rumus devians dan memiliki acuan pada hipotesis berikut:

H_0 : model logit sesuai atau pantas digunakan

H_1 : model logit tidak sesuai atau tidak pantas digunakan

Statistik uji yang digunakan sebagai berikut:

$$D = -2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^J \left(y_{ij} \ln \left(\frac{\pi_{ij}}{y_{ij}} \right) \right)$$

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen dalam rumus tersebut:

1. -2 : konstanta yang digunakan dalam uji devians. Mengalikan dengan -2 memungkinkan devians untuk mengikuti distribusi chi-square, yang kemudian dapat digunakan untuk uji hipotesis.
2. $\sum_{i=1}^n$: tanda penjumlahan, yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan untuk setiap pengamatan individu dari 1 hingga n (total pengamatan).
3. $\sum_{j=1}^J$: tanda penjumlahan kedua menunjukkan bahwa perhitungan juga dilakukan untuk setiap kategori respons dari 1 hingga J (total kategori).
4. y_{ij} : nilai pengamatan atau frekuensi aktual dari kategori ke- j untuk pengamatan ke- i . Ini merepresentasikan jumlah kasus yang sebenarnya diamati pada kategori tertentu.
5. $\ln \left(\frac{\pi_{ij}}{y_{ij}} \right)$: logaritma natural dari rasio antara probabilitas yang diprediksi oleh model π_{ij} dengan nilai yang diamati y_{ij} . Probabilitas prediksi π_{ij} adalah probabilitas yang dihitung oleh model untuk pengamatan ke- i dan kategori ke- j .
6. π_{ij} : nilai harapan pengamatan ke- i pada kategori ke- j , j merupakan jumlah kovariat serta p yaitu keseluruhan jumlah total parameter pada model.

Penarikan kesimpulan tolak H_0 ketika nilai $D > (df, \alpha)$ atau dengan nilai $p\text{-value} \geq \alpha (0,05)$.

3.5.4 Pengujian Koefisien Determinasi Model

Uji koefisien determinasi dilaksanakan untuk melihat besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam mengetahui seberapa

besar koefisien determinasi dapat dilihat dari hasil *Pseudo R-Square* seperti *Cox and Snell*, *Nagelkerke* serta *McFadden* (Nurfadila dan Intan 2023)

1. Cox dan Snell

$$R_c^2 = 1 - \left(\frac{L(M_{full})}{L(M_{intercept})} \right)^{\frac{2}{n}}$$

Keterangan:

$L(M_{full})$ adalah nilai likelihood dari model penuh (model yang mencakup semua variabel prediktor,

$L(M_{intercept})$ adalah nilai likelihood dari model intercept saja (model tanpa variabel prediktor),

N adalah jumlah observasi dalam dataset.

Rumus ini mengukur seberapa baik model yang diestimasi cocok dengan data dibandingkan dengan model tanpa prediktor, dengan penyesuaian untuk ukuran dataset. Nilai biasanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model yang diestimasi memberikan kecocokan yang lebih baik terhadap data dibandingkan dengan model tanpa prediktor

2. Nagelkerke

$$R_{Nagelkerke}^2 = \frac{R_c^2}{1 - (L(M_{intercept}))^{\frac{2}{n}}}$$

Keterangan:

R_c^2 adalah nilai cox dan snell

$L(M_{intercept})$ adalah nilai likelihood dari model intercept saja (model tanpa variabel prediktor),

N adalah jumlah observasi dalam dataset.

Model ini merupakan modifikasi dari cox dan snell yang sering kali kemampuannya jarang sekali mendekati angka 1.

3. McFadden

$$R_m^2 = 1 - \ln\left(\frac{L(M_{full})}{L(M_{intercept})}\right)$$

Keterangan:

$L(M_{full})$ adalah nilai likelihood dari model penuh (model yang mencakup semua variabel prediktor,

$L(M_{intercept})$ adalah nilai likelihood dari model intercept saja (model tanpa variabel prediktor),

Ln adalah logaritma,

N adalah jumlah observasi dalam dataset.

Rumus ini sama dengan yang lainnya untuk mencari determinasi menggunakan model dengan prediktor dibandingkan dengan model tanpa prediktor.

Dalam penelitian ini penulis akan memilih model yang memiliki nilai koefisien determinasi tertinggi, baik Cox and Snell, Nagelkerke, atau McFadden. Nilai tertinggi dari koefisien determinasi menunjukkan model yang paling efektif dalam menjelaskan variabilitas data dibandingkan dengan model dasar tanpa variabel prediktor. Penulis memastikan bahwa model tersebut memberikan kecocokan terbaik dan akurasi prediksi yang paling tinggi. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membuat keputusan berdasarkan model yang paling

mampu menjelaskan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respons secara efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Sumatera Utara merupakan provinsi yang berada di Pulau Sumatera beribukota di Kota Medan. Berikut peta Sumatera Utara:



Gambar 4. 1 Peta Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Dakira, 2023

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 1° hingga 4° Lintang Utara dan 98° hingga 100° Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya mencakup Provinsi Aceh di sebelah utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat, serta Selat Malaka di sebelah timur. Secara geografis,

Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional strategis di Selat Malaka, berdekatan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara terbagi menjadi tiga bagian: bagian timur yang relatif datar, bagian tengah yang bergelombang hingga berbukit, dan bagian barat yang merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur, yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77% dari total luas Sumatera Utara, dikenal sebagai daerah yang subur dengan tingkat kelembaban dan curah hujan yang tinggi. Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, sehingga mengalami peningkatan kepadatan penduduk akibat arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir sering terjadi di wilayah ini karena berkurangnya pelestarian hutan, erosi, dan pendangkalan sungai.

Provinsi ini memiliki luas sekitar 71.680,68 km², yang merupakan sekitar 3,72% dari total luas wilayah Indonesia. Pada Tahun 2023 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa yang terdiri dari 7.721.314 jiwa penduduk laki-laki dan 7.665.326 jiwa perempuan atau dengan rasio jenis kelamin/*sex ratio* sebesar 100,73 (BPS Sumatera Utara, 2024). Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Kabupaten tersebut meliputi Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Sedangkan kota-kota yang ada di Sumatera Utara adalah Binjai,

Gunungsitoli, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, dan Tebing Tinggi.

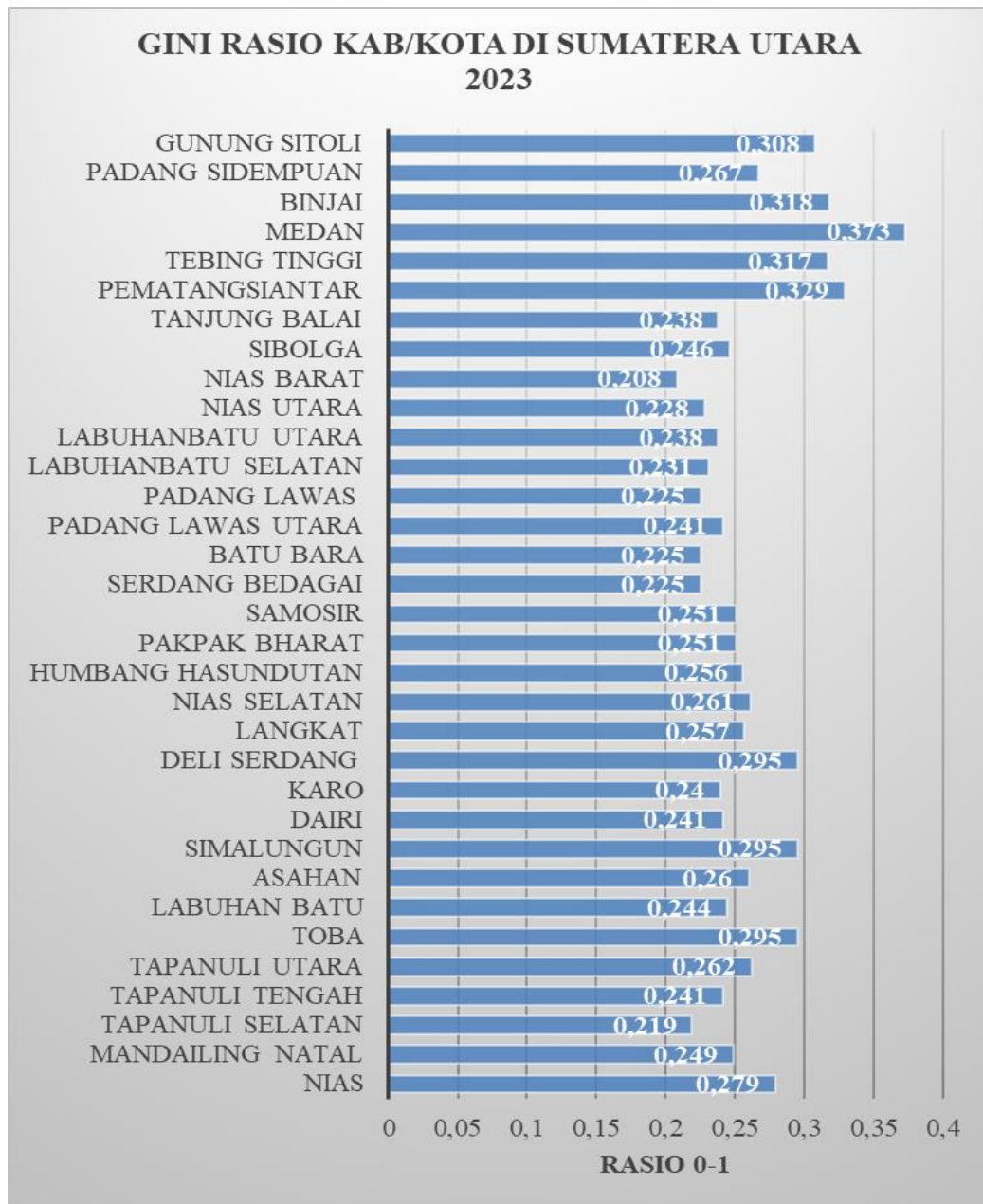
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Analisis data dilakukan dengan metode regresi logistik ordinal, menggunakan program SPSS versi 25. Objek penelitian ini yaitu: 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen, IPM, tingkat kemiskinan, dan UMP sebagai variabel independen. Berikut dekripsi variabel penelitian.

4.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah tingkat pemerataan pendapatan di suatu wilayah yang tidak sesuai ataupun tidak merata. Menurut Smith dan Todaro ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketimpangan pendapatan yaitu: inefisiensi ekonomi, melemahnya solidaritas dan stabilitas sosial serta menyebabkan alokasi aset tidak tetap (Wahyuni dan Andriyani 2022).

Untuk melihat ketimpangan pendapatan dapat menggunakan gini rasio sebagai representasi dari variabel ini. Berikut gini rasio 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 4. 2 Rasio Gini Kab/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari data menunjukkan kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki gini rasio yang berbeda antar daerah, hal ini menunjukkan bahwasanya di Sumatera Utara telah terjadi ketimpangan pendapatan. Daerah yang memiliki gini rasio paling tinggi yaitu Kota Medan sebesar 0,373 poin. Hal ini dapat disebabkan oleh Medan sebagai

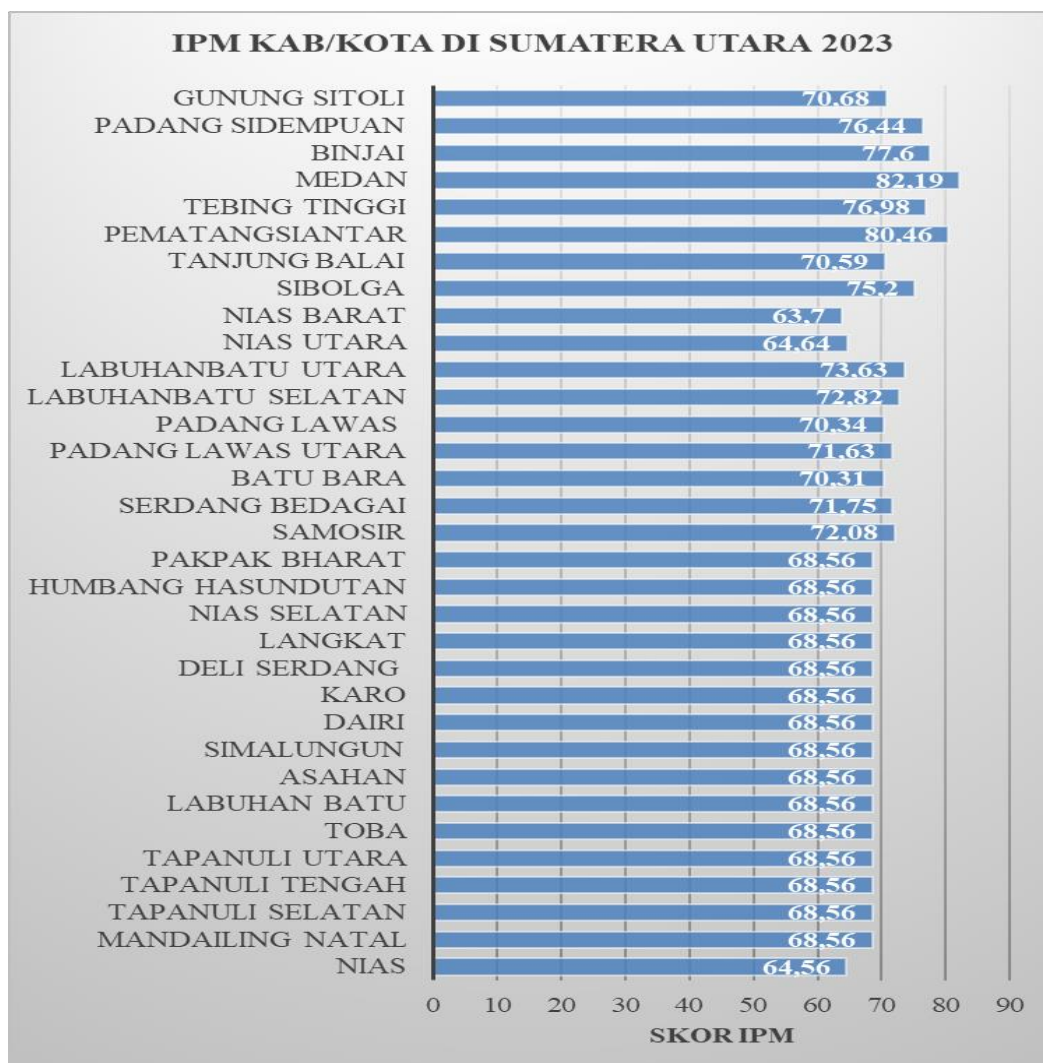
pusat perekonomian hanya dinikmati oleh sedikit kalangan, akses pendidikan bagus yang juga hanya dinikmati kalangan atas sehingga terjadi ketimpangan yang tinggi di wilayah kota ini.

Daerah yang memiliki rasio gini paling rendah yaitu Kabupaten Nias Barat sebesar 0,208 poin. Nias Barat adalah sebuah kabupaten yang berada dipulau Nias (diluar pulau Sumatera), kabupaten ini memiliki infrastruktur ataupun perekonomian yang tertinggal jika dibandingkan Medan. Hal ini dapat menjadikan alasan mengapa tingkat pendapatan cenderung merata dikarenakan tidak adanya pusat perekonomian besar dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

4.2.2 Indek Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah ukuran kesejahteraan manusia yang didasarkan oleh tiga dimensi yaitu: dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi pendapatan. IPM merupakan indikator untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, mendapat informasi dan pengetahuan, dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk memiliki kehidupan yang terhormat (*Human Development Report*, 1990).

IPM berbentuk skor dari 1-100, semakin tinggi angkanya maka semakin bagus sumber daya manusia di wilayah tersebut.



Gambar 4. 3 Skor IPM Kab/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari data menunjukkan dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki skor IPM yang berbeda antar wilayah di provinsi yang sama. Ada perbedaan yang signifikan antara beberapa kabupaten/kota, Kota Medan memiliki skor IPM paling tinggi yaitu 82,19 poin. Hal ini dapat dipengaruhi oleh infrastruktur yang sangat memadai di kota ini, fasilitas kesehatan yang dapat mudah dijangkau lokasinya oleh masyarakat, dan fasilitas pendidikan yang baik. Fakta lainnya Kota Medan

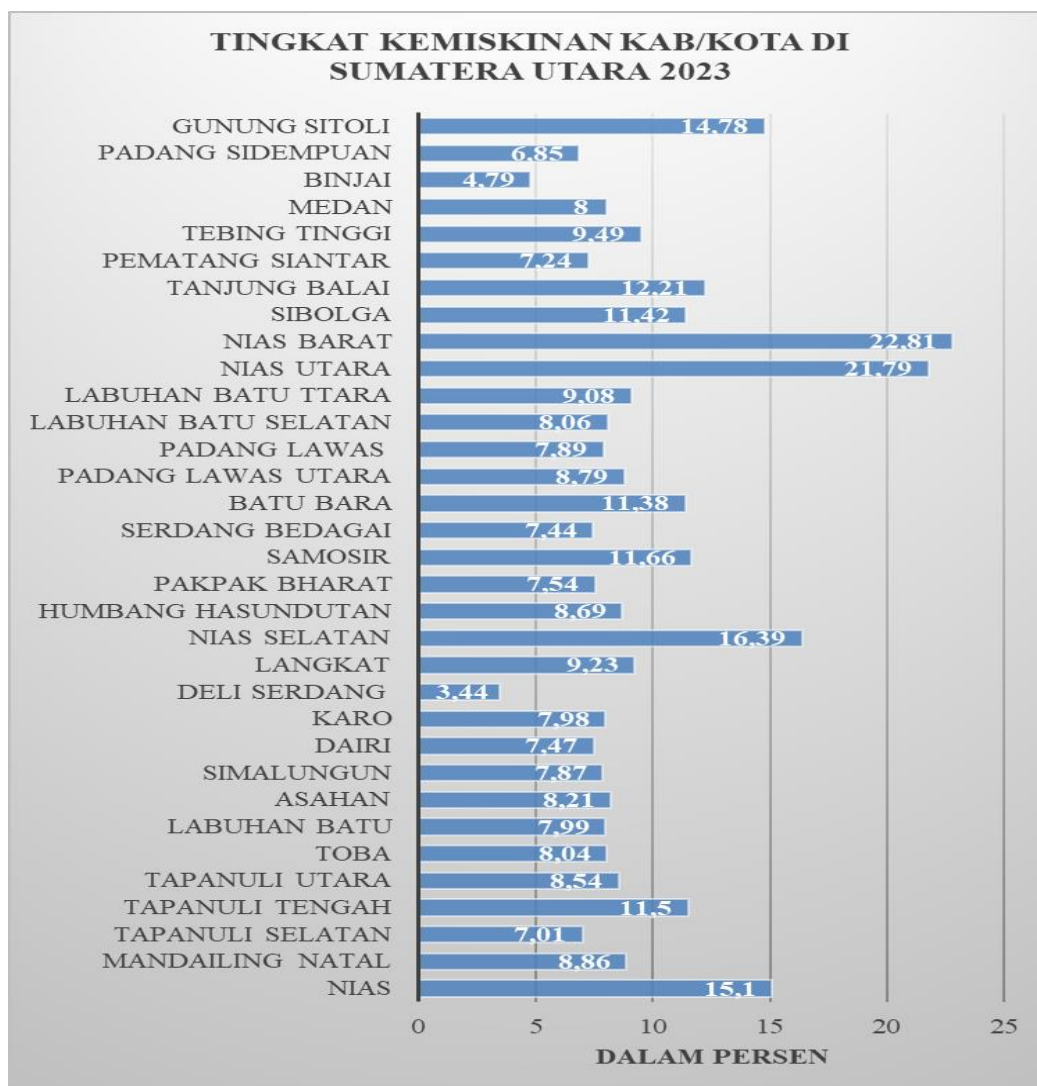
merupakan ibukota provinsi sehingga mendapatkan perhatian lebih dan dana pembangunan yang lebih banyak dari pemerintah.

Disisi lain wilayah dengan IPM paling rendah yaitu Kabupten Nias Barat yaitu sebesar 63,7 poin. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu: Nias Barat berlokasi diluar pulau Sumatera sehingga kurang mendapat perhatian dan dukungan dana yang memadai dari pemerintah provinsi. Disebabkan kurangnya perhatian, maka infrastruktur kesehatan ataupun pendidikan sangat kurang sekali bagi masyarakat dan kemudian menyebabkan pendapatan yang rendah akibat infrastruktur yang terbatas.

4.2.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), kemiskinan didefinisikan sebagai situasi individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka yang dianggap sebagai tuntutan minimal, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang telah ditetapkan dengan standar tertentu.

Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, artinya jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk lalu diubah dalam satuan persen.



Gambar 4. 4 Tingkat Kemiskinan kab/kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

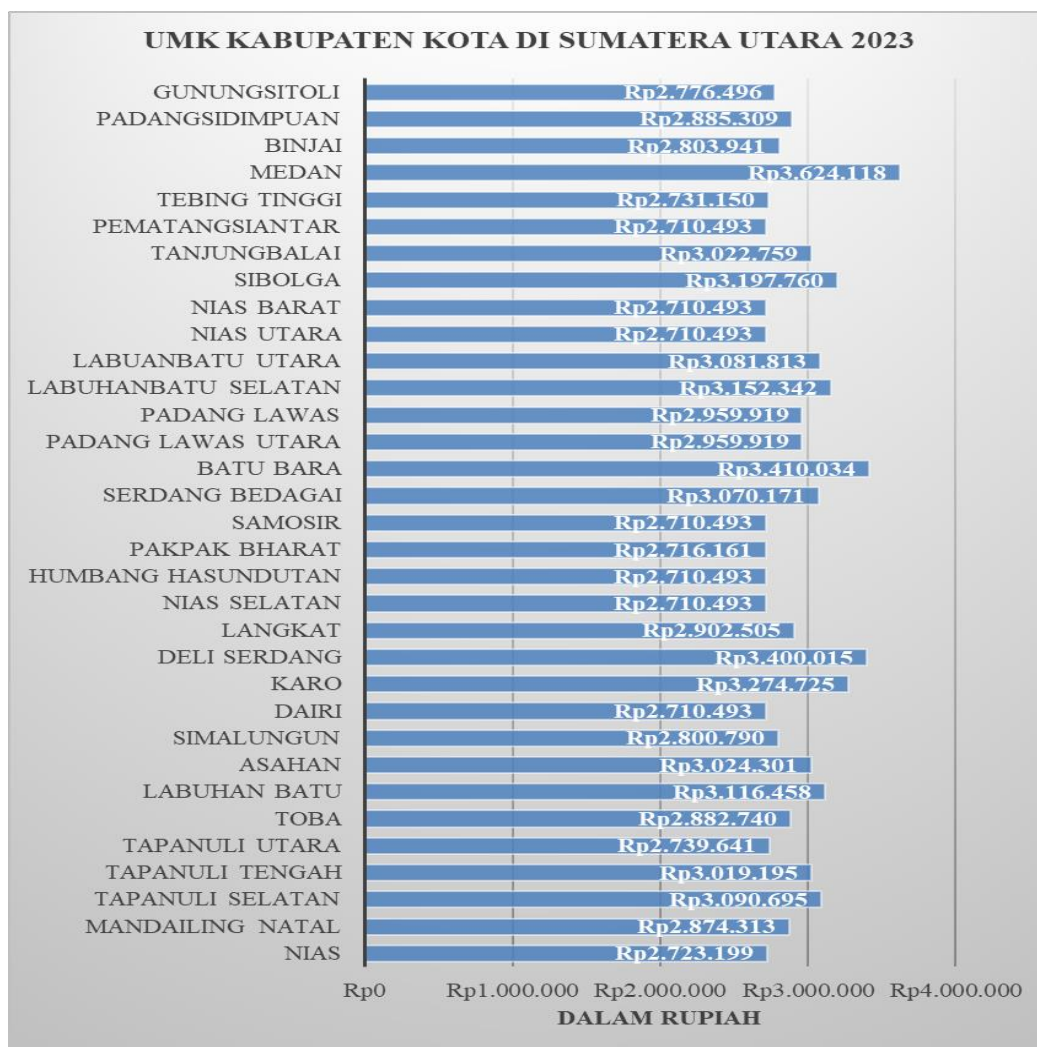
Dari data menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Utara sangatlah berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah yaitu: Kabupaten Deli Serdang dengan 3,44% penduduk miskin di wilayahnya. Hal ini dapat diakibatkan oleh wilayah yang dekat dengan pusat ibukota provinsi yaitu Medan, sehingga dari segi infrastruktur sangat mendukung kegiatan perekonomian

masyarakatnya, mobilitas masyarakat yang tinggi yang juga memicu tingkat kemiskinan yang rendah disebabkan masyarakatnya dapat bekerja di ibukota provinsi dikarenakan jaraknya yang dekat dan akses transportasi yang mudah dijangkau serta di wilayah ini banyak terdapat pabrik-pabrik sehingga lapangan pekerjaan banyak tersedia.

Wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias Barat sebesar 22,81% penduduknya dalam kondisi miskin. Ada beberapa penyebabnya yaitu minimnya infrastruktur dalam menunjang kegiatan perekonomian, lapangan pekerjaan yang sedikit alias sedikit sekali pabrik atau perusahaan di wilayah ini, Nias Barat jauh dari pusat perekonomian provinsi yaitu Medan sehingga tidak memicu roda perekonomian masyarakat.

4.2.4 Upah Minimum Kabupaten

Menurut Sukirno (2016) upah adalah pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh karyawan berdasarkan ketentuan kontrak kerja dalam bentuk uang atau barang, dan dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan karyawan serta keluarganya. Dapat diartikan Upah Minimum Kabupaten (UMP) adalah upah minimum yang berlaku di satu wilayah kabupaten. Upah ini dapat dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.



Gambar 4. 5 UMK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Dari data menunjukkan UMK setiap wilayah memiliki perbedaan yang signifikan walaupun di satu provinsi yang sama. Wilayah dengan UMK paling tinggi yaitu Kota Medan sebesar Rp3.624.118. Besarnya upah ini diakibatkan oleh permintaan lapangan pekerjaan yang tinggi, infrastruktur ekonomi yang bagus, dan biaya hidup yang besar khasnya kota metropolitan. Tentu tidak lepas dari tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Medan sehingga upah juga tinggi.

Wilayah dengan upah paling rendah yaitu Nias Selatan sebesar Rp2.710.493, hal ini dapat disebabkan oleh permintaan tenaga kerja yang kecil alias lapangan pekerjaan yang sulit, infrastruktur ekonomi yang kurang seperti jalan, pabrik dan lain-lainnya. Serta biaya hidup yang masih rendah karena inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah hal ini ditandai Produk Domestik Bruto (hasil asli daerah tersebut) yang rendah.

4.3 Regresi Logistik Ordinal

Penelitian ini menggunakan regresi logistik ordinal dengan menggunakan 33 data kabupaten/kota. Regresi logistik ordinal digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan (Y) dengan menggunakan 3 variabel X yaitu: IPM, Tingkat Kemiskinan, dan UMK.

Secara keseluruhan terdapat 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Variabel Y yaitu Ketimpangan Pendapatan yang direpresentasikan rasio gini dibagi menjadi 5 pengelompokan yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk melakukan pembagian maka digunakan tabel distribusi frekuensi untuk membagi 33 rasio gini kabupaten/kota menjadi 5 pengelompokan. Distribusi frekuensi adalah rangkaian data yang diurutkan menurut kuantitas ataupun kualitasnya (Wahab et al. 2021). Berikut pembagian rasio gini dengan tabel distribusi frekuensi.

Tabel 4. 1 Kategori Rasio Gini Kab/Kota di Sumatera Utara

Kategori	Jumlah
Sangat Rendah	8
Rendah	6
Sedang	6
Tinggi	8
Sangat Tinggi	5

Sumber: BPS Sumatera Utara, (2023) Data Telah Diolah

Berdasarkan data tabel 4.1, menunjukkan bahwasanya dari 33 kabupaten/kota terdapat 8 kab/kota dengan kategori sangat rendah, 6 kab/kota dengan kategori rendah, 6 kab/kota kategori sedang, 8 kab/kota kategori tinggi, dan 5 kab/kota kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan keberagaman tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan pembagian rasio gini dengan tabel distribusi frekuensi. Pembagian kategori ini merupakan syarat dasar dari regresi logistik ordinal yang mengharuskan terdapat kategori pada variabel dependen.

Tahap selanjutnya dari regresi logistik ordinal adalah pembentukan model parameter pada variabel independen dan dependen. Berikut hasil yang diperoleh pengestimasi parameter.

Tabel 4. 2 Estimasi Parameter Logistik Ordinal

Variabel	Estimate	Std. Error
Threshold	[Y = 1,00]	15,154
	[Y = 2,00]	16,168
	[Y = 3,00]	17,207
	[Y = 4,00]	19,021
Location	X1	0,356
	X2	0,027
	X3	-3,155E-06
		1,597E-06

Sumber: Data Olah SPSS 25

Berdasarkan 4.2, telah diketahui estimasi parameter pada variabel dependen serta masing-masing variabel independen telah diketahui, maka terdapat 4 fungsi logit yang didapatkan dari 5 pengelompokan variabel dependen. Berikut 4 fungsi logit yang didapatkan:

$$\text{Logit } Y_1 = 15,154 - 0,356X_1 - 0,027X_2 + 3,155 \times 10^{-6}X_3$$

$$\text{Logit } Y_2 = 16,168 - 0,356X_1 - 0,027X_2 + 3,155 \times 10^{-6}X_3$$

$$\text{Logit } Y_3 = 17,207 - 0,356X_1 - 0,027X_2 + 3,155 \times 10^{-6}X_3$$

$$\text{Logit } Y_4 = 19,021 - 0,356X_1 - 0,027X_2 + 3,155 \times 10^{-6}X_3$$

4 model logit kumulatif yang terbentuk merupakan model regresi logistik ordinal yang perlu diuji parameternya secara keseluruhan untuk mendapatkan variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks rasio gini.

4.3.1 Uji Parameter Regresi Logistik Ordinal

Dalam menganalisis parameter pada regresi logistik ordinal dilakukan secara keseluruhan (simultan) dengan uji-G dan secara sebagian (parsial) dengan uji-Wald.

4.3.1.1 Hasil Uji Simultan (Uji G)

Statistik uji G adalah uji rasio kemungkinan (*likelihood ratio test*) yang digunakan untuk menguji peranan variabel independen di dalam model secara bersama-sama. Uji ini menggunakan acuan hipotesis: H_0 : tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen; H_1 : ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dapat disimpulkan jika nilai $\chi^2 \leq \text{uji-G}$ artinya tolak H_0 atau nilai p (*p-value*) $\leq \alpha$ (0,05), maka tolak H_0 .

Tabel 4. 3 Hasil Uji G

Model	G	Chi-Square	Df	<i>p-value</i>
Final	92,650	12,768	3	0,005

Sumber: Data Olah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat berdasarkan pengujian mendapatkan hasil G sebesar 92,650 dengan *p-value* 0,005. Pengambilan kesimpulan berdasarkan nilai chi-square \leq uji-G artinya tolak H_0 atau nilai p (*p-value*) $\leq \alpha$ (0,05), maka tolak H_0 . Dari hasil tersebut maka diambil kesimpulan tolak H_0 disebabkan nilai signifikansi lebih kecil dari α 0,05. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat 1 ataupun lebih variabel independen yang memiliki pengaruh ke variabel dependen.

4.3.1.2 Hasil Uji Parsial (Uji Wald)

Uji wald digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial (terpisah) antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Parsial ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel IPM (X1), Tingkat Kemiskinan (X2), dan UMK (X3) terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan (Y). Berikut hasil Uji Parsial yang telah dilakukan. Uji ini menggunakan acuan hipotesis: H_0 : variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen; H_1 : variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penarikan kesimpulan untuk menolak H_0 adalah ketika nilai *wald* $>$ (1) atau ketika nilai *p-value* $\leq \alpha$ (0,05).

Tabel 4. 4 Hasil Uji Wald

Variabel	Wald	p-value	Keputusan
X1	7,564	0,006	H_0 Ditolak
X2	0,055	0,8153	H_0 Diterima
X3	3,904	0,0482	H_0 Ditolak

Sumber: Data Olah SPSS 25

Dari hasil pengujian pada tabel 4.4, dengan acuan ketika nilai $wald > (1)$ atau ketika nilai $p\text{-value} \leq \alpha (0,05)$ dianggap signifikan berpengaruh. dapat dilihat bahwasanya terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh yaitu: IPM (X1), UMK (X3) dan 1 variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (X2). Hasil ini didapat dari variabel yang memiliki nilai $p\text{-value} \leq \alpha$.

4.3.1.3 Penghitungan dan Interpretasi *Odds Ratio*

Odds Ratio menggambarkan perubahan dalam kecenderungan, baik peningkatan maupun penurunan, setiap kali terjadi penambahan satu unit pada variabel independen jika variabel tersebut bersifat kontinu, atau menunjukkan perbedaan kecenderungan antara kategori jika variabel independen bersifat kategorikal. Penghitungan odds ratio hanya dilakukan untuk variabel yang berpengaruh (Budyanra dan Azzahra 2017). Variabel yang berpengaruh yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten.

Berikut hasil perhitungan:

Tabel 4. 5 Penghitungan dan Interpretasi *Odds Ratio*

Variabel	<i>Odds Ratio</i>
Indeks Pembangunan Manusia	1,427
Tingkat Kemiskinan	1,027
Upah Minimum Kabupaten	0,999

Sumber: Data Olah SPSS 25

Dari tabel 4.5, Indeks Pembangunan Manusia (OR = 1,427): Peningkatan satu unit dalam Indeks Pembangunan Manusia meningkatkan peluang terjadinya ketimpangan pendapatan hingga 1,427 kali, menunjukkan bahwa daerah dengan

nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami ketimpangan pendapatan.

Upah Minimum Kabupaten (OR = 0,999): Peningkatan satu unit dalam Upah Minimum Kabupaten meningkatkan peluang terjadinya ketimpangan pendapatan sebesar 0,999 kali, ini menunjukkan daerah dengan Upah Minimum Kabupaten yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang jauh lebih besar untuk mengalami ketimpangan pendapatan.

4.3.2 Hasil Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah model yang didapatkan layak atau tidak digunakan. Uji ini menggunakan hipotesis H_0 : model logit sesuai atau pantas digunakan; H_1 : model logit tidak sesuai atau tidak pantas digunakan. Penarikan kesimpulan tolak H_0 ketika nilai $D > (df, \alpha)$ atau dengan nilai $p\text{-value} \geq \alpha (0,05)$. Berikut hasil pengujian menggunakan uji *Deviance*

Tabel 4. 6 Hasil Uji *Goodness of Fit*

	Chi-Square	df	<i>p-value.</i>
Deviance	92,650	125	0,987

Sumber: Data Olah SPSS 25

Dari hasil pengujian tabel 4.5, terlihat bahwasanya nilai $p\text{-value} \geq \alpha (0,05)$. Maka keputusannya yaitu H_0 diterima yang artinya model yang didapatkan pada regresi logistik ordinal pengujian ini telah sesuai atau memenuhi.

4.3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar efek variabel independen yang berpengaruh yaitu IPM (X1), UMK (X3) terhadap ketimpangan pendapatan kab/kota di Sumatera Utara. Koefisien determinasi atau

R-Square yang digunakan pada penelitian ini antara lain Nagelkerke, McFadden, Cox and Snell. Berikut hasil pengujian yang telah didapatkan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi	Nilai
Cox and Snell	0,321
Nagelkerke	0,335
McFadden	0,121

Sumber: Data Olah SPSS 25

Dari hasil pengujian tabel 4.6, terlihat bahwasanya nilai Cox and Snell sebesar 0,321, nilai Nagelkerke sebesar 0,335, dan nilai McFadden sebesar 0,121. Hasil ini menjadikan Nagelkerke sebagai model yang digunakan dalam koefisien determinasi dikarenakan memiliki nilai paling tinggi diantara 3 model koefisien determinasi. Nilai Nagelkerke R-Square (0,335) menggambarkan besaran pengaruh variabel independen terhadap Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini berkontribusi sebesar 33,5% terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan. Sementara sisanya, yaitu 67,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan secara simultan, maka keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpeluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan

di Sumatera Utara sebesar 1,427 kali. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menduga bahwa IPM berpeluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Peningkatan IPM dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena manfaatnya tidak merata. Akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena kelompok yang lebih mampu lebih mudah memanfaatkan peluang ekonomi akibat peningkatan IPM sementara sebagian masyarakat lain tidak dapat memanfaatkannya. Akibatnya, ketidakmerataan tersebut memperlebar ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini et al (2022) yang menunjukkan bahwasanya IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang sudah berada dalam posisi yang lebih baik, sementara kelompok yang kurang mampu tidak mendapatkan manfaat yang sama.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersad et al (2022) yang menemukan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena di Sumatera Bagian Selatan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kemudian diikuti sektor pertambangan dan di urutan ketiga adalah sektor industri, dalam kegiatan produksi ketiga sektor tersebut tidak membutuhkan pekerja dengan IPM tinggi namun dalam kegiatan produksi sektor tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar,

sehingga tingkat IPM tidak mempengaruhi pendapatan perkapita di Sumatera Bagian Selatan.

4.4.2 Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengujian parsial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingkat kemiskinan tidak memiliki peluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan yang merata di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, ketika kemiskinan bertambah hal ini tidak berpengaruh terhadap ketimpangan disebabkan penduduk kaya tidak bertambah ataupun berkurang sehingga distribusi pendapatan tetap merata dikalangan penduduk miskin.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri et al (2022) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. Hal ini disebabkan ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan tidak dipengaruhi oleh banyaknya penduduk miskin di area tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil yang didapatkan Hindun et al (2019) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya jika tingkat kemiskinan naik maka ketimpangan pendapatan akan ikut naik. Hal ini disebabkan jika penduduk miskin bertambah maka akan menambah jarak antara penduduk miskin dan penduduk kaya, alias mempengaruhi distribusi pendapatan.

4.4.3 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil Pengujian secara parsial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpeluang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara sebesar 0,999 kali. Hal ini terjadi karena kenaikan UMK akan mengakibatkan 2 hal yaitu: pengusaha mengurangi jumlah pekerja untuk efisiensi produksi akibat peningkatan UMK dan kenaikan UMK tidak akan mempengaruhi penduduk yang bekerja disektor informal, kemudian menciptakan ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang bekerja di bidang formal (terdampak kenaikan UMK) dengan masyarakat yang bekerja dibidang informal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurmalisa Sungkar dan Nazamuddin (2015) menemukan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia . Hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, sehingga tidak menikmati upah minimum tetapi ikut menanggung beban sebagai konsumen akibat kenaikan harga barang diakibatkan kenaikan upah pekerja formal.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurfadila dan Intan (2023) yang menemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini disebabkan di Indonesia banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga banyak pekerja yang tidak menikmati upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain upah minimum tidak berdampak pada Ketimpangan Pendapatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia berpotensi mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara sebesar 1,427 kali, ketika meningkat ataupun menurun Indeks Pembangunan Manusia akan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara.
2. Secara parsial Tingkat Kemiskinan tidak berpotensi mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara, ketika meningkat ataupun menurun Tingkat Kemiskinan tidak akan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara.
3. Secara parsial Upah Minimum Kabupaten berpotensi mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara sebesar 0,999 kali, ketika meningkat ataupun menurun Upah Minimum Kabupaten akan mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Sumatera Utara harus melakukan peningkatan infrastruktur, penambahan fasilitas umum, dan peningkatan kualitas pendidikan perlu difokuskan di daerah-daerah yang tertinggal. Penting agar peningkatan

kualitas sumber daya manusia dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang tingkat pendapatan ataupun strata sosial

2. Pemerintah Sumatera Utara harus lebih mengoptimalkan program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan pendidikan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah harus menjalin kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan perangkat desa. Kolaborasi yang efektif di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga kemiskinan menurun dan ketimpangan dengan kelompok kaya dan miskin semakin berkurang.
3. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan upah minimum kabupaten, memastikan penetapannya sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan perwakilan pemerintah. Hal ini penting agar upah yang diterima pekerja dapat mencukupi kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya, sehingga standar hidup masyarakat dapat meningkat dan tercipta pendapatan yang lebih merata di masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan dan memperluas jumlah data untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik ordinal sebagai alat analisis, namun peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi metode analisis terbaru yang lebih sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian

mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat dalam memahami dinamika ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ahdiat. 2022. "Luas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berdasarkan Provinsi (2022)." *KataData*. Diambil (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-dengan-perkebunan-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>).
- Agusalim, Lestari, dan Tanti Novianti. 2023. "Pembuktian Empiris Teori Upah Efisiensi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 14(December 2023):119–32.
- Amri, Khairul. 2017. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)* 1(1):1–11.
- Anam, M. S., Inawati, Y., & Rosia, R. 2021. "Factors Affecting The Human Development Index (HDI) In Central Java Province." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 6(1), 12–2. doi: :10.31002.
- Angkat, Susi Susanti, dan Saharuddin Saharuddin. 2024. "Pengaruh Indeks Gini Rasio, Indeks Kemahalan Konstruksi, Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 6(2):13. doi: 10.29103/jeru.v6i2.14582.
- BPS. 2024. "Gini Ratio Menurut Provinsi." Diambil (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgJmG==/gini-rasio--maret-2023.html>).
- BPS, Sumatera Utara. 2023a. "IPM Menurut Kabupaten/Kota." Diambil (<https://sumut.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>).
- BPS, Sumatera Utara. 2023b. "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota." Diambil (<https://sumut.bps.go.id/indicator/23/73/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kab-kota.html>).
- BPS, Sumatera Utara. 2024. *Povinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024*. Medan: Bps Sumatera Utara.
- Budyandra, Budyandra, dan Ghaida Nasria Azzahra. 2017. "Penerapan Regresi Logistik Ordinal Proportional Odds Model pada Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita di Provinsi Aceh Tahun 2015." *Media Statistika* 10(1):37. doi: 10.14710/medstat.10.1.37-47.
- Camelia. 2023. "DKI Jakarta hingga Makasar, ini kota di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya." *Liputan6.com*. Diambil (<https://www.liputan6.com/citizen6/read/5319869/dki-jakarta-hingga->

makassar-ini-10-kota-terbesar-di-indonesia-berdasarkan-jumlah-penduduknya).

- Cepy, Suherman. 2022. "Mengukur Ketimpangan Pendapatan: Kurva Lorenz & Gini Ratio." *jagoekonomi.com*. Diambil 1 Juni 2024 (<https://jagoekonomi.com/2022/07/07/kurva-lorenz-gini-ratio/>).
- Dakira. 2023. "Peta Sumatera Utara Lengkap HD Terbaru dan Keterangannya." *Peta-hd.com*. Diambil (<https://peta-hd.com/peta-sumatera-utara/>).
- Damanik, Anggiat Mugabe, Zulgani Zulgani, dan Rosmeli Rosmeli. 2018. "Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi." *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7(1):15–25. doi: 10.22437/pdpd.v7i1.4533.
- Darnah, Darnah. 2011. "Regresi Logistik Ordinal untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sexual Remaja Ordinal Logistic Regression for Analysis Factors of Influence Behavior Adolescent Sexual Darnah Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman." *Ekspansional* 2(1):47–52.
- Dwi, A. A. 2020. "Sedih, Ada 1,2 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan." *DetikFinance*. Diambil (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970510/sedih-ada-1-2-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>).
- Ersad, Muhammad, Amri Amir, dan Zulgani Zulgani. 2022. "Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17(2):425–38. doi: 10.22437/jpe.v17i2.15614.
- Hindun, Hindun, Ady Soejoto, dan Hariyati Hariyati. 2019. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8(3):250. doi: 10.26418/jebik.v8i3.34721.
- Istikharoh, Whinarko Juli Prijanto, dan Rian Destiningsih. 2018. "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 - 2018." *Directory Journal of Economic* 2(1):109–25.
- Istiqamah, Istiqamah, Syaparuddin Syaparuddin, dan Selamat Rahmadi. 2018. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia)." *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7(3):111–26. doi: 10.22437/pdpd.v7i3.6903.
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 16 ed. Jakarta:

Rajagrafindo Persada.

Johan, Harlan. 2018. *Analisis Regresi Logistik*. Depok: Gunadarma.

KataData. 2023. “UMK Lengkap Sumatera Utara.” Diambil (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/11/daftar-lengkap-umk-sumatra-utara-tahun-2023>).

Nurfadila, Monika Refiana, dan Putroue Keumala Intan. 2023. “Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Gini Ratio Menggunakan Regresi Logistik Ordinal.” *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan* 20(1):38–46. doi: 10.22487/2540766x.2023.v20.i1.16258.

Nurul huda. 2017. *ekonomi pembangunan islam*. Prenada Media, 2017.

Nuryulianingdyah W. 2022. “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 26(1):36–53. doi: 10.24123/jeb.v26i1.4842.

Omar, Md Abdullah, dan Kazuo Inaba. 2020. “Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis.” *Journal of Economic Structures* 9(1). doi: 10.1186/s40008-020-00214-4.

Park, Cyn Young, dan Rogelio V. Mercado. 2021. “Financial inclusion: New measurement and cross-country impact assessment.” *Financial Inclusion in Asia and Beyond: Measurement, Development Gaps, and Economic Consequences* (539):98–128. doi: 10.2139/ssrn.3199427.

Peraturan Pemerintah RI. 2003. “Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” *Pemerintah RI* (Kolisch 1996):49–56.

Peraturan Pemerintah RI. 2021. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.”

Putra, P. G., dan Anis, A. 2022. “Analisis Kausalitas Indeks Pembangunan Manusia Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 4(4):57–70.

Rambey, Mara Judan. 2018. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 4(1):32–36.

Riadi, Muchlisin. 2020. “Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran).” *kajianpustaka.com*. Diambil (<https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>).

- Rini, Gusti Ayu Made Candra, dan Ida Ayu Putu Ari Suciptawati, Ni Lu Putu Utari. 2022. "Identifikasi Faktor Yang Memengaruhi Gini Ratio Di Indonesia." *E-Jurnal Matematika* 11(3):160. doi: 10.24843/mtk.2022.v11.i03.p376.
- Rivan, Aditya. 2024. "Kenapa Disebut dengan 9 Naga? Sejarah Munculnya Istilah Para Pengusaha Mengendali Ekonomi Indonesia." *Suara.com*. Diambil (<https://www.suara.com/bisnis/2024/07/28/163000/kenapa-disebut-dengan-9-naga-sejarah-munculnya-istilah-para-pengusaha-mengendali-ekonomi-indonesia>).
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, Muhammad Nasir. 2015. "Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3(2):40–53.
- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi, M. .. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. 3 ed. Bandung: Afabeta.
- Sugiarti, Ike, dan Rendra Erdkhadifa. 2023. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5(5):2427–41. doi: 10.47467/alkharaj.v5i5.3498.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Teneh, E. G. 2019. "Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014 2018)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (04):19.
- Wahab, Abdul, Akhmad Syahid, dan Junaedi. 2021. "Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi." *Education and Learning Journal* 2(1):40–48.
- Wahyuni, Sri, dan Devi Andriyani. 2022. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap ketimpangan Pendapatan Diprovinsi Aceh." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 5(1):39. doi: 10.29103/jeru.v5i1.7919.
- World Bank. 2024. "Gini Index." Diambil (https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=KR&most_recent_value_desc=false).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rasio Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023

NO	Kab/Kota	Indeks Gini (Rasio)
1	Nias	0.2790
2	Mandailing Natal	0.2490
3	Tapanuli Selatan	0.2190
4	Tapanuli Tengah	0.2410
5	Tapanuli Utara	0.2620
6	Toba	0.2950
7	Labuhan Batu	0.2440
8	Asahan	0.2600
9	Simalungun	0.2950
10	Dairi	0.2410
11	Karo	0.2400
12	Deli Serdang	0.2950
13	Langkat	0.2570
14	Nias Selatan	0.2610
15	Humbang Hasundutan	0.2560
16	Pakpak Bharat	0.2510
17	Samosir	0.2510
18	Serdang Bedagai	0.2250
19	Batu Bara	0.2550
20	Padang Lawas Utara	0.2410
21	Padang Lawas	0.2250
22	Labuhanbatu Selatan	0.2310
23	Labuanbatu Utara	0.2380
24	Nias Utara	0.2280
25	Nias Barat	0.2080
26	Sibolga	0.2460
27	Tanjungbalai	0.2380
28	Pematangsiantar	0.3290
29	Tebing Tinggi	0.3170
30	Medan	0.3730
31	Binjai	0.3180
32	Padangsidempuan	0.2670
33	Gunungsitoli	0.3080

Lampiran 2: Tabel IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023

No	Kab/Kota	IPM (Skor)
1	Nias	64.56
2	Mandailing Natal	68.56
3	Tapanuli Selatan	71.55
4	Tapanuli Tengah	70.91
5	Tapanuli Utara	74.65
6	Toba	76.38
7	Labuhan Batu	73.69
8	Asahan	71.56
9	Simalungun	74.29
10	Dairi	73.27
11	Karo	75.98
12	Deli Serdang	76.52
13	Langkat	72.21
14	Nias Selatan	64.12
15	Humbang Hasundutan	70.75
16	Pakpak Bharat	69.58
17	Samosir	72.08
18	Serdang Bedagai	71.75
19	Batu Bara	70.31
20	Padang Lawas Utara	71.63
21	Padang Lawas	70.34
22	Labuhanbatu Selatan	72.82
23	Labuanbatu Utara	73.63
24	Nias Utara	64.64
25	Nias Barat	63.70
26	Sibolga	75.20
27	Tanjungbalai	70.59
28	Pematangsiantar	80.46
29	Tebing Tinggi	76.98
30	Medan	82.19
31	Binjai	77.60
32	Padangsidempuan	76.44
33	Gunungsitoli	70.68

Lampiran 3: Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Sumatera Utara 2023

No	Kab/Kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)
1	Nias	15.10
2	Mandailing Natal	8.86
3	Tapanuli Selatan	7.01
4	Tapanuli Tengah	11.50
5	Tapanuli Utara	8.54
6	Toba	8.04
7	Labuhan Batu	7.99
8	Asahan	8.21
9	Simalungun	7.87
10	Dairi	7.47
11	Karo	7.98
12	Deli Serdang	3.44
13	Langkat	9.23
14	Nias Selatan	16.39
15	Humbang Hasundutan	8.69
16	Pakpak Bharat	7.54
17	Samosir	11.66
18	Serdang Bedagai	7.44
19	Batu Bara	11.38
20	Padang Lawas Utara	8.79
21	Padang Lawas	7.89
22	Labuhanbatu Selatan	8.06
23	Labuanbatu Utara	9.08
24	Nias Utara	21.79
25	Nias Barat	22.81
26	Sibolga	11.42
27	Tanjungbalai	12.21
28	Pematangsiantar	7.24
29	Tebing Tinggi	9.49
30	Medan	8.00
31	Binjai	4.79
32	Padangsidempuan	6.85
33	Gunungsitoli	14.78

Lampiran 4: Tabel UMR Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2023

No	Kab/Kota	UMR (Juta Rupiah)
1	Medan	3.624.118
2	Batu Bara	3.410.034
3	Deli Serdang	3.400.015
4	Karo	3.274.725
5	Sibolga	3.197.760
6	Labuhanbatu Selatan	3.152.342
7	Labuhanbatu	3.116.458
8	Tapanuli Selatan	3.090.695
9	Labuhanbatu Utara	3.081.813
10	Serdang Bedagai	3.070.171
11	Asahan	3.024.301
12	Tanjungbalai	3.022.759
13	Tapanuli Tengah	3.019.195
14	Padang Lawas	2.959.919
15	Padang Lawas	2.959.919
16	Langkat	2.902.505
17	Padang Sidempuan	2.885.309
18	Toba	2.882.740
19	Mandailing Natal	2.874.313
20	Binjai	2.803.941
21	Simalungun	2.800.790
22	Gunungsitoli	2.776.496
23	Tapanuli Utara	2.739.641
24	Tebingtinggi	2.731.150
25	Nias	2.723.199
26	Pakpak Bharat	2.716.161
27	Dairi	2.710.493
28	Nias Selatan	2.710.493
29	Humbang Hasundutan	2.710.493
30	Samosir	2.710.493
31	Nias Utara	2.710.493
32	Nias Barat	2.710.493
33	Pematangsiantar	2.710.493

Lampiran 5: Pembagian Rasio Gini dengan Tabel Distribusi Frekuensi.

Kelompok	Rentang Data	Data	Total
1 (sangat rendah)	0.2080 - 0.2380	0.2080, 0.2190, 0.2250, 0.2250, 0.2280, 0.2310, 0.2380,0.2380	8
2 (rendah)	0.2400 - 0.2460	0.2400, 0.2410, 0.2410, 0.2410, 0.2440, 0.2460	6
3 (sedang)	0.2490 - 0.2570	0.2490, 0.2510, 0.2510, 0.2550, 0.2560, 0.2570	6
4 (tinggi)	0.2600 - 0.2950	0.2600, 0.2610, 0.2620, 0.2670, 0.2790, 0.2950, 0.2950,0.2950	8
5 (sangat tinggi)	0.3080 - 0.3730	0.3080, 0.3170, 0.3180, 0.3290, 0.3730	5
jumlah			33

Lampiran 6: Estimasi Parameter Logistik Ordinal

		Parameter Estimates					95% Confidence Interval	
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 1,00]	15,154	9,492	2,549	1	0,110	-3,450	33,759
	[Y = 2,00]	16,168	9,526	2,881	1	0,090	-2,503	34,838
	[Y = 3,00]	17,207	9,580	3,226	1	0,072	-1,570	35,984
	[Y = 4,00]	19,021	9,698	3,847	1	0,050	0,013	38,029
Location	X1	0,356	0,129	7,564	1	0,006	0,102	0,609
	X2	0,027	0,115	0,055	1	0,815	-0,199	0,253
	X3	-3,155E-06	1,597E-06	3,904	1	0,048	-6,285E-06	-2,522E-08

Link function: Logit.

Lampiran 7: Hasil Uji Simultan (Uji G)

Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	105,417			
Final	92,650	12,768	3	0,005

Link function: Logit.

Lampiran 8: Hasil Uji Parsial (Uji Wald)

Parameter Estimates

		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 1,00]	15,154	9,492	2,549	1	0,110	-3,450	33,759
	[Y = 2,00]	16,168	9,526	2,881	1	0,090	-2,503	34,838
	[Y = 3,00]	17,207	9,580	3,226	1	0,072	-1,570	35,984
	[Y = 4,00]	19,021	9,698	3,847	1	0,050	0,013	38,029
Location	X1	0,356	0,129	7,564	1	0,006	0,102	0,609
	X2	0,027	0,115	0,055	1	0,815	-0,199	0,253
	X3	-3,155E-06	1,597E-06	3,904	1	0,048	-6,285E-06	-2,522E-08

Link function: Logit.

Lampiran 9: Hasil Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	129,228	125	0,380
Deviance	92,650	125	0,987

Link function: Logit.

Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Pseudo R-Square	
Cox and Snell		0,321
Nagelkerke		0,335
McFadden		0,121

Link function: Logit.